**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia pendidikan ini begitu cepat, sejalan dengan kemajuan teknologi san globalisasi. Dunia pendidikan sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang begitu pesat.[[1]](#footnote-1) Maka dari itu, pada masyarakat modern, pendidikan merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan hampir menyamai kebutuhan pokok manusia.

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak dipisahkan dari kehidupan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara. Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun 12 wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan sederajat. Pendidikan sekolah yang hasilnya dapat dilihat dikemudian hari perlu mendapat pembiayaan yang memadai, yang sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan keluarga.[[2]](#footnote-2) Sumber dana dan biaya dari pemerintah yaitu pemerintah meyediakan sebagian pendapatan negara untuk keperluan pendidikan.

Wajib belajar 9 tahun bermutu jika di Sekolah Dasar (SD) ataupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) penyelenggaraan pendidikannya juga bermutu. Sehingga Sekolah Dasar harus dikelola dengan baik agar menjadi sekolah yang bermutu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik. Menurut Ibrahim Bafadal “sekolah dasar dapat dikatakan bermutu baik apabila mampu mengemban misinya dalam rangka mencapai tujuan kelembagaannya”.[[3]](#footnote-3)

Departemen Pendidikan Nasional beserta jajarannya telah berusaha untuk meningkatkan mutu sekolah dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan. Mulai dari kebijakan yang menyangkut kurikulum tingkat satuan pendidikan, akreditasi sekolah, penyediaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah, akses buku murah melalui website, pengembangan kultur sekolah, peningkatan mutu guru melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi .[[4]](#footnote-4) Pemerintah menyusun berbagai kebijakan yang terkait dengan pendidikan, seperti adanya program Wajib Belajar Sembilan Tahun, program Bantuan Siswa Miskin bagi siswa yang kurang mampu, program Bantuan Operasional Sekolah, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia.

Pada maaret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada juli 2005. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM.[[5]](#footnote-5)

Penyediaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah dimaksudkan untuk pemenuhan biaya operasional pendidikan di sekolah tercukupi. Dedi Supriadi menyebutkan hampir tidak ada upaya pendidikan yang tidak memerlukan biaya, dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Pengertian biaya yang dimaksud adalah dalam arti yang luas, yaitu semua pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang, ataupun tenaga.[[6]](#footnote-6) Besar-kecilnya biaya pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa. Pemahaman terhadap aspek-aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting dalam konteks perencanaan pembiayaan.

Menurut Mulyasa keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.[[7]](#footnote-7) Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Pengelolaan keuangan sekolah harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini dilakukan agar besar dana yang diterima sekolah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 1 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2018, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Menurut “Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2018” sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2018 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, pemerintahan pusat perlu mendorong pemerintah pusat perlu mendorong pemerintahan dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Agar pengalokasian dana BOS sesuai dengan tujuan dan sasaran diperlukan petunjuk teknis, salah satu perbedaan dari Juknis BOS tahun sebelumnya adalah adanya penegasan tentang pembiayaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (UASBN).

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi Dalam merencanakan penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, dan dua puluh lima tahunan. Dengan adanya rencana, penggunaan dana BOS dapat dilakukan dengan baik.

Dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah, sekolah wajib membebaskan biaya pendidikan siswa dari pungutan operasional. Selain agar beban orang tua menjadi ringan, BOS diarahkan agar bisa meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi.Dengan adanya BOS diharapkan mampu memfasilitasi rakyat yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah.Dengan adanya BOS fasilitas sekolah seharusnya juga menjadi perhatian, karena pendidikan tidak hanya membutuhkan teori saja tetapi juga diperlukan praktek untuk menunjang keterampilan yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Dilihat dari aspek fisik masih banyak gedung atau bangunan sekolah yang masih kurang layak pakai dan luput dari perhatian pemerintah.Apalah arti sekolah gratis kalau fasilitas sekolah sangat minimalis, tenaga pendidik kualitas rendah atau tidak professional dan mutu pendidikan rendah.

Di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Dalam penggunaan dana BOS ini tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi. Karena dana BOS ini hanya membiayai komponen-komponen kegiatan tertentu, seperti pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler siswa, perawatan sekolah, pembayaran honorium bulanan guru honorer dan lain sebagainya. Setelah menggunakan dan BOS kemudian langkah berikutnya yaitu membuat pertanggungjawaban. Dalam salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS masing-masing pengelola diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak yang terkait. Secara umum hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan, dan pemanfaatan dana serta pengaduan masalah jika ada.

Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Engkoswara dalam Eneng Muslihah mengemukakan bahwa, manajemen pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.[[8]](#footnote-8) Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Menurut Soetjipto pengelolaan keuangan meliputi: kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertip adminstrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[[9]](#footnote-9)

Dalam Implementasinya disekolah, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, atau pengendalian.[[10]](#footnote-10)

Salah satu tahap untuk mengelola keuangan sekolah yaitu dengan cara menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), RAPBS ini harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan, penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah.[[11]](#footnote-11) RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal . salah satu sumber dana yang diberikan pemerintah ialah dana BOS maka pengelolaan dana ini harus baik dan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.

Menurut Jamadi, selaku kepala sekolah SMP Ihsaniyah mengatakan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah yang diadakan pemerintah sangat bagus sekali karena dapat membantu meringankan biaya para anak usia sekolah yang kurang mampu untuk melanjutkan kembali ke jenjang berikutnya, Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap angka pendidikan di Indonesia semakin meningkat, selain itu dengan adanya dan Bantuan Operasional dapat membantu sekolah swasta seperti kami dalam hal peningkatan mutu pendidikan.[[12]](#footnote-12)

SMP Ihsaniyah merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Kota serang, yang memiliki Nomor Induk sekolah (NIS) 2022804010127200120 dan sudah terakreditasi C, SMP Ihsaniyah ini berada di bawah naungan yayasan yaitu yayasan YPI Sholeh Ma’mun yang diketuai oleh Drs. H. TB. Syarif Ansori, memiliki luas tanah 2.500 M2. SMP Ihsaniyah pula merupakan sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah siswa penerima dana BOS disekolah ini mencapai 111 Siswa pada tahun ajaran 2018/2019, Sekolah ini memiliki 1 Ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 6 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium, 1 Musholah, 3 Kamar mandi/WC.

SMP Ihsaniyah merupakan sekolah swasta yang mayoritas para siswa nya mempunyai latar belakang keluarga yang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah pertama, Prestasi siswa di SMP Ihsaniyah ini masih rendah karena kurangnya motivasi belajar siswa, dan kwalitas guru pun kurang memadai karena kurangnya pelatihan guru, serta kesejahteraan guru belum mencukupi. Dalam bidang Ekstrakulikuler di SMP Ihsaniyah belum berjalan dengan baik karena kurang memadainya sarana yang ada dan kurangnya pembinaan terhadap minat dan bakat siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul penelitian **“Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah”.**

1. **Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan diatas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang akan membuka wawasan penulis dalam meneliti lebih lanjut. Identifikasi masalah ini meliputi:

1. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang masih belum maksimal.
2. Kurang nya peran komite sekolah dalam perencanaan program BOS.
3. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai.
4. Mahalnya biaya pendidikan.
5. **Pembatasan Masalah**

 Penelitian ini menitik beratkan pada upaya meningkatkatkan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah dan dapat di implementasikan secara efektif dan efisien di SMP Ihsaniyah . Oleh karena itu, permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut ini:

1. Peneliti memfokuskan obyek penelitian kepada variabel peran komite sekolah dalam perencanaan penggunaan dana BOS serta Implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah.
2. Penelitian menetapkan lokasi penelitian terdapat di SMP Ihsaniyah.
3. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah?
2. Bagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Ihsaniyah?
3. Bagaimana peran komite sekolah dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah?
4. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem administrasi ketatausahaan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah.
2. Untuk mengetahui dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Ihsaniyah.
3. Untuk mengetahui peran komite sekolah dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah.
4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Mafaat Teoritis
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten berkaitan dengan penelitian Implementasi Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah .
3. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian.
4. Manfaat Praktis
	1. Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pihak sekolah untuk lebih bijak dalam pengelolaan dan pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah.
	2. Diharapkan dapat memberi pemahaman terhadap komite sekolah untuk lebih berperan dalam proses perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
5. **Sistematika Penulisan**

 Untuk memperoleh gambaran skripsi ini, penulis membagi lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Berikut ini penulis uraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

 Bab Pertama, Pendahuluan terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sisitematika Pembahasan.

 Bab Kedua, Landasan Kajian Teoritik, yang terdiri atas: Pengertian Implementasi, Pengertian Program, Konsep Implementasi Program, Pembiayaan Pendidikan, Pengertian BOS, Petunjuk Teknis BOS

 Bab Ketiga, Metode Penelitian Meliputi: Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Metode Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, Informan Data, Teknik Pengolahan danAnalisi Data, Uji keabsahan data.

 Bab Keempat, Hasil dan Pembahasan terdiri atas: Deskripsi Hasil penelitian, Pembahasan Persiklus, dan Pembahasan hasil penelitian.

 Bab Kelima, Penutup, Kesimpulan dan Saran-Saran

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. **Implemetasi Program**
3. **Pengertian Implementasi**

 Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino mendefinisikan “Implementasi Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan padai tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.[[13]](#footnote-13) Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program. Implementasi dalam pandangan Agama Islam, yaitu suatu tindakan atau kerja dengan tujuan merubah suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Ar-Ra’ad ayat 11:

Artinya: *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia* (QS. Ar-Ra’ad: 11).

 Ayat ini menerangkan bahwasanya Allah tidak akan mengubah suatu kaumnya sehingga mereka mau merubah dirinya sendiri, hal ini berhubungan dengan implementasi program yang mana implementasi merupakan suatu bentuk upaya untuk melakukan suatu perubahan dengan konsep yang jelas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi.

1. **Model-Model Implementasi**
2. **Model Implementasi menurut Donal van Metter & Carl van Horn**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation .* Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:[[14]](#footnote-14)

1. **Ukuran dan tujuan kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan . Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

1. **Sumber Daya**

keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks bahwa: *”New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*.

1. **Karakteristik organisasi pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal  ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

1. **Disposisi atau sikap para pelaksana**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam: ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

1. **Komunikasi Antar – Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

1. **Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif

1. **Model Implementasi menurut George C. Edwards III**

Model Implementasi yang dikembangkan George C. Edwards III merupakan model implementasi ketiga yang berspektif *top-down*, istilah implementasi ini ialah *Direct and Indirect Impact on Implementation.[[15]](#footnote-15)* Model Implementasi ini merupakan model Implementasi yang mengutamakan dari atasan ke bawahan.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George Edwards III sebagai berikut :[[16]](#footnote-16)

1. **Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

1. **Sumber daya**

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknikkelistrikan.
Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan.

Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/ program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

1. **Disposisi atau sikap**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

1. **Struktur Birokrasi**

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

1. **Pengertian Program**

Menurut Suharsimi dan Cepi Safruddin dalam Eko Putro Widoyoko ada 2 pengertian program yaitu, pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum dapat diartikan sebagai rencana Secara umum pengertian program merupakan penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program merupakan kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, belangsung dalam program yang berkesinambungan yang terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.[[17]](#footnote-17) Sedangkan menurut Suharsimi mendefinisikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama.[[18]](#footnote-18)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik, jadi dalam menentukan suatu program harus dirumuskan tujuan melalui partisipasi dari pelaksanaan programnya.

1. **Konsep Implementasi Program**

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan program itu sendiri, Jones dalam Arif Rohman menyebutkan implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.[[19]](#footnote-19) Menurut Charles O Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana, ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:[[20]](#footnote-20)

1. Pengorganisasian

 Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

1. Interpretasi

 Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

1. Penerapan atau Aplikasi

 Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

 Salah satu model Implementasi program yakni model yang di ungkapkan oleh David C. Korten dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan, Model ini lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.[[21]](#footnote-21)

**Gambar 2.1 Model Kesesuaian Implementasi Program**

 **PROGRAM**

 Output Tugas

**PEMANFAATAN**

**ORGANISASI**

 Kebutuhan Kompetensi

 Tuntutan Putusan

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12)

Korten dalam menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuian antara program dengan pemanfaatan, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

1. **Pembiayaan Pendidikan**
	1. **Pengertian Pembiayaan Pendidikan**

 Biaya merupakan sesuatu yang tidak lepas dari kegiatan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan biaya, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya. Menurut Mulyono, pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitik beratkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat.[[22]](#footnote-22) Nanang Fattaah mengutarakan pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan.[[23]](#footnote-23)

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.[[24]](#footnote-24)

Definisi biaya menurut Supriyono dalam Dedi Supriadi biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (*cost*) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Dedi Supriadi dalam bukunya mendefinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).[[25]](#footnote-25)

Menurut Hasbullah Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan.[[26]](#footnote-26) Biaya dalam pengertian ini yaitu jenis pengeluaran baik dalam bentuk barang maupun tenaga untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitik beratkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Unsur biaya adalah hal yang menentukan dalam mekanismepenganggaran. Penentuan biaya sangat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan lembaga/organisasi dalam mencapai tujuan tertentu.

Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan “ekonomi pendidikan”. Bahkan, secara tegas Mark Blaugh mengemukakan bahwa “*the economics of* *education is a branch of economics*”. Jadi, dapat dikatakan menurut pandangan inibahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab, pembiayaan pendidikan menurut Blaugh sebgai *the costing and* *financing of school places*, yaitu bagian dari permasalahan ekonomi pendidikan. Padabagian lain Mark Blaugh mengemukakan, “*the economic of education is only part of* *the story of any educational issue*”. Menurut pandangan ini mengkaji ilmu ekonomipendidikan maupun pembiayaan pendidikan hanya merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan.[[27]](#footnote-27)

 Menurut Yahya pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.[[28]](#footnote-28)

 Sedangkan Nanang Fattah mendefinisikan biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.[[29]](#footnote-29)

 Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitaas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pemahaman tentang konsep pembiayaan pendidikan perlu diketahui pengertian dari tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang meliputi (1) objek biaya, (2) informasi manajemen biaya, (3) pembiayaan (*financing*), (4) keuangan (*finance*), (5) anggaran (*budget*), (6) biaya (*cost*), dan (7) pemicu biaya (*cost driver*).[[30]](#footnote-30)

1. Objek Biaya

 Suatu lembaga atau organisasi di dalam menjalankan programnya selalu terkait dengan aktivitas-aktivitas sebagai ujung *(operating Core)* system lembaga atau organisasi yang membutuhkan biaya. Biaya dari seluruh kegiatan yang ada ini merupakan objek biaya. Blocher dkk, mengatakan bahwa objek biaya merupakan sesuatu alumusi biaya dari berbagai aktivitas. Menurut Blocher dalam Mulyono ada empat jenis objek biaya, yakni (1) produk atau kelompok produk yang saling berhubungan, (2) jasa, (3) departemen (departemen teknis, departemen sumber daya manusia), dan (4) proyek, seperti penelitian, promosi pemasaran, atau usaha jasa komunitas.[[31]](#footnote-31)

 Pendidikan sebagai suatu lembaga atau organisasi tidak berorientasi kepada laba, maka objek biayanya adalah jasa dengan seluruh elemen (perangkat keras dan lunak) yang melekat pada prosesnya.

1. Informasi Manajemen Biaya

 Manajemen Biaya adalah suatu aktivasi pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencana, pengambilan keputusan, control. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan secara maksimal, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan baik itu lembaga yang bersifat profit maupun nonprofit.

 Blocher dkk dalam Mulyono, mengatakan bahwa informasi manajemen biaya merupakan suatu konsep yang luas, yakni mencakup segala informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara efektif suatu perusahaan atau organisasi nonprofit, baik berupa informasi keuangan tentang biaya maupun informasi nonkeuangan yang ada kaitannya dengan produktivitas, kualitas, dan faktor kunci sukses lainnya untuk suatu organisasi.[[32]](#footnote-32)

Secara khusus Blocher dkk dalam Mulyono, mengatakan perlunya informasi manajemen biaya dibutuhkan untuk empat hal yaitu:[[33]](#footnote-33)

* 1. Manajemen strategiss, yaitu untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang tepat untuk pemilihan produk, metode prose, teknik dan saluran pemasaran, dan hal-hal yang bersifat jangka panjang.
	2. Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendukung keputusan yang terus menerus dilakukan dalam kaitannya dengan pemindahan peralatan, pengelolaan aliran kas, pembelian bahan, dan penjadwalan.
	3. Pengendalian manajemen dan operasional. Informasi manajemen biaya dibutuhkan untuk memberikan dasar yang tidak efisien dan untuk memberi penghargaan dan dukungan kepada para manajer yang paling efektif.
	4. Penyusun laporan keuangan. Informasi manajemen biaya dibutuhkan untuk memberikan catatan yang akurat tentang persediaan dan asset lainnya.
1. Pembiayaan *(Financing)*

 Pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang. Sementara biaya pendidikan adalah seluruh usaha yang dicurahkan oleh pemerintah dan masyarakat pendidikan berupa uang maupun non moneter, biaya memerlukan penginventarisasian yang jelas.

 *Financing* (pembelanjaan atau pembiayaan) merupakan fungsi penyediaandana yang diperlukan untuk melaksanakan usaha. Kebanyakan usaha besar atau kecil memerlukan dana untuk modal tetap seperti tanah, bangunan, mesin, gudang, modal kerja, dan modal tetap lainnya. Dalam usaha yang besar atau kecil modal dapat terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Keuangan *(Finance)*

 Urusan keungan pada suatu organisasi seperti pada lembaga Pendidikan, tidak saja mencakup uang pembayaran yang sah, tetapi jga kredit bank. Definisi yang sederhana tentang keuangan *(Finance)* adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Sementara dalam dunia usaha keuangan meliputi pemeliharaan kas yang memadai dalam bentuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Alat yang digunakan dalam keuangan meliputi seluruh metodo peminjaman uang dan pertukaran satu jenis hak yang berkenaan dengan keuangan dengan yang lainnya.

1. Anggaran *(Budget)*

 Anggaran (*budget*) merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. *Ensiklopedi Manajemen* menggunakan budgeting sebagai perencanaan dan koordinasi dari berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu periode tertentu dengan melakukan prakiraan kebutuhan yang diperlukan dan hasil yang ingin dicapai serta pengawasan pelaksanaannya.

 Knezevich dalam Mulyono mengemukakan budgeting merupakan alat penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk biaya untuk setiap komponen kegiatan. Prosedur penganggaran dilakukan dengan (1) menyusun ramalan tentang kemungkinan pendapatan dan belanja selama periode tertentu (2) menetapkan anggaran berdasarkan ramalan, (3) statistik pelaksanaan dikumpulkan dan dibandingkan dengan dugaan-dugaan, (4) mengukur varian-varian dan menganalisis penyebab-penyebabnya, dan (5) melakukan perbaikan.[[34]](#footnote-34)

 Nanang Fattah menjelaskan bahwa anggaran *(budget)* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yg digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.[[35]](#footnote-35) Oleh karena itu, didalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

 Sebagaimana dijelaskan Yahya, faktor-faktor yang perlu dikembangkan dalam membuat anggaran adalah (1) permintaan terhadap hasil produksi dan stabilitas permintaan potensi dasar, (2) jenis-jenis hasil produksi yang dibuat, (3) jenis-jenis dan sifat hasil produksi yang dibuat, (4) kemampuan menyusun jadwal dan mengatur pelaksanaan, (5) jumlah dana yang dipergunakan dibandingkan dengan hasil yang mungkin dicapai, serta (6) perencanaan dan pengawasan.[[36]](#footnote-36)

1. Biaya *(Cost)*

 Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen. Konsep biaya secara keseluruhan berkaitan dengan setiap fungsi manajemen, yaitu (1) manajemen strategis, (2) perencanaan dan pengambilan keputusan, (3) penentuan harga pokok jasa dan pelaporan keuangan, dan (4) pengendalian manajemen dan pengendalian operasional.

1. Pemicu Biaya *(Cost Drive)*

 Pemicu biaya (*cost driver*) menurut Blocher dkk dalam Mulyono adalah faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total. Artinya jumlah total biaya sangat dipengaruhi oleh *cost driver* sebagai faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dari suatu objek biaya.[[37]](#footnote-37)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 ayat (1) dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana yaitu :

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang
3. kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
	1. **Model Pembiayaan Pendidikan**
4. Model Flat Grant *(Flat Grant Model)*

Jones dan Morphet mengemukakan bahwa model flat grant mode; adalah dana bantuan dari Negara dialokasikan ke sekolah didaerah- daerah tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan kemampuan membayar pajak antara daerah itu untuk keperluan pendidikan disekolah-sekolah pembiayaan pendidikan model ini menggambarkan bahwa pemerintah pusat memberikan dana pendidikan kesekolah-sekolah di daerah secara merata, sedangkan kekurangannya ditutupi/diranggung oleh daerah masing-masing (ditanggung pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota).[[38]](#footnote-38)

 Menurut Lunenburg dan Ornstein, model flat grant ini adalah model bantuan negara untuk sekolah didaerah-daerah berdasarkan penggalian jumlah tertentu menurut jumlah yang dipertimbangkan.[[39]](#footnote-39) Model ini merupakan model pembiayaan pendidikan paling kuno, sederhana, dan metode keuangan sekolah yang paling tidak memadai bantuan Negara untuk sekolah didaerah-daerah setempat berdasarkan pengalian jumlah tertentu menurut jumlah yang dipertimbangkan.

 Ada dua perbedaan penting dalam model flat grant ini, yaitu; (1) Suatu jumlah yang seragam bagi tiap siswa dan guru atau beberapa unit lain yang perlu diberikan tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan yang penting dalam tiap-tiap pembayaran terhadap perbedaan pelayanan program. (2) jumlah yang berubah-ubah setiap bagian yang diperlukan menggambarkan perlunya perbedaan-perbedaan didalam tiap pembayaran yang dibagikan pada sekolah didaerah-daerah setempat.

 Kelemahan system ini tidak mempertimbangkan kebutuhan para siswa seperti pada peserta didik yang pintar atau sebaliknya, maupun peserta didik yang memiliki kemampuan dua bahasa. Sebab, biaya pendidikan peserta didik dengan dua bahasa tentunya lebih mahal dibandingkan peserta didik yang hanya menggunakan satu bahasa, misalnya bahasa inggris sebagai bahasa aslinya. Program-program pendidikan yang lebih khusus, misalnya pada sekolah-sekolah kejuruan lebih banyak membutuhkan biaya dibandingkan sekolah-sekolah umum (SMP,SMU) yang tersebar didaerah-daerah. Model bantuan ini juga tidak mempertimbangkan sekolah-sekolah umum yang sudah memiliki banyak dana dengan program pendidikan yang biasa-biasa saja dan sebaliknya kurang memperhatian sekolah-sekolah yang memiliki program khusus dan sekaligus kurang memiliki banyak dana.

 Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa dibawah model tipe ini tidak berdasarkan pada upaya pajak dan kesehatan tetapi berdasarkan pada jumlah siswa yang harus di didik. Uang bantuan Negara dibagikan pada sekolah didaerah tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan kemampuan pembayaran pajak. Ada dua perbedaan penting dari model ini, yaitu : (1)beberapa unit kebutuhan pendidikan perlu diberikan kepada siswa dan guru tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan penting dalam tiap-tiap pembayaran program-program dari pelayanan pendidikan yang berbeda (2)jumlah yang berubah-ubah setiap bagian yang diperlukan memgambarkan perlunya perbedaan-perbedaan didalam tiap-tiap pembayaran yang dibagikan pada sekolah didaerah-daerah setempat.[[40]](#footnote-40)

1. Model Landasan Perencanaan *(Foundation Plan Models)*

Landasan model perencanaan *(Foundation Plan)* menurut Lunenburg dan Ornstein merupakan pendekatan yang paling umum dan tujuannya untuk menjamin pengeluaran tahunan yang minimal per siswa seluruh sekolah di daerah, terlepas dari kekayaan yang dapat dikenakan pajak lokal.[[41]](#footnote-41) Sementara menurut Jones dalam Mulyono memberlakukan angka properti pajak minimum untuk setiap sekolah disuatu distrik Negara bagian yang memberikan tingkat pendidikan memadai tanpa memberatkan pembayar pajak setempat, meski dengan jatah minimum yang dihasilkan.[[42]](#footnote-42)

 Pendekatan landasan perencanaan merupakan model pembiayaan paling umum dan bertujuan menjamin pengeluaran tahunan yang minimal untuk sekolah-sekolah. Cara kerja model pembiayaan ini adalah (1)daerah menentukan biaya per siswa per tahun sebagai biaya minimum (2) Negara mematok pajak minimum yang harus diberlakuakan untuk semua distrik sekolah (3) Negara memberi bantuan kepada setiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama sampai selisih antara jumlah yang berhasil dikumpulkan secara lokal pada tarif minimum.

1. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya *(full state funding models)*

Model pendanaan Negara sepenuhnya menurut Jones dalam Mulyono adalah semua pendanaan sekolah aka dikumpulkan ditingkat Negara dan distribusikan kesekolah distrik dengan dasar yang sama.[[43]](#footnote-43) Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminasi perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan kerangka acuan penting untuk menyokong konsep pendanaan sepenuhnya dari pemerintah harus dipertimbangkan.

 Model ini menentukan tanggung jawab akan kepercayaan pendidikan pada pemerintah, perbandingan program khusus dan pencapaian siswa pada lokalitas didasarkan pada derajat perbandingan pendanaan. Semua dana Negara bagian untuk pendidikan sepenuhnya menjadi pendanaan Negara. Ketidak samaan muncul dibawah perencanaan, tidak ada perbedaan pajak atau pembelanjaan yang muncul pada pendanaan sepenuhnya oleh pemerintah tergantung pada filsafat pendidikan yang berbeda dibandingkan yang dianut oleh kebanyakan Negara bagian.

* 1. **Model Pembiayaan di Indonesia**

 Di Indonesia tidak ada aturan baku model pembiayaan pendidikan yang digunakan akan tetapi, pembiayaan yang ada lebih menunjukan bauran pembiayaan pendidikan meliputi pembiayaan oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintahan daerah (APBD), masyarakat, dan sebagian investor. Sementara itu, model bantuan pembiayaan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah lembaga-lembaga donor maupun masyarakat umum bersifat campuran dari beberapa model pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam bagian ini, disajikan implementasi beberapa model pembiayaan disekolah atau madrasah tingkat dasar hingga SLTA yang merupakan hasil wawancara Disertasi Baharudin dalam Mulyono, antara lain:[[44]](#footnote-44)

1. Bantuan Operasional Sekolah atau Madrasah (BOS)

Dana ini merupakan bantuan pembiayaan operasional sekolah atau madrasah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN). Lembaga pendidikan yang mendapatkan BOS hanya diperuntukkan untuk program wajib belajar Sembilan tahun yaitu SD/MI dan SMP/MTS.

1. Bantuan Khusus Murid (BKM)

Bantuan ini diperuntukkan oleh siswa yang kurang mampu sejak SD/MI, SMP/MTS, maupun SMK/SMA/MA. Dana BKM merupakan *Sharring* antara dana pusat dan daerah. Cara mendapatkan dana BKM, sekolah mengirimkan data siswa kediknas kemudian diknas yang menentukan sekolah mana dan berapa jumlahnya yang mendapatkan dana BKM. Sementara yang menentukan siswa mana yang berhak mendapatkan dana ini adalah pihak sekolah.

1. Dana Bantuan Orang Tua berupa SPP

Jumlah besar SPP pada masing-masing sekolah dan madrasah tidak sama sesuai dengan jenjang, jenis serta kemajuan pada masing-masing sekolah dan madrasah. Semakin maju sekolah dan madrasah, maka umumnya juga semakin tinggi SPP yang harus dibayar oleh peserta didik.

* 1. **Fungsi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan**

 Pengelolaan pembiayaaan pendidikan sama dengan manajemen pembiayaan, dan pengelolaan mempunyai tiga fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

 Perencanaaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.[[45]](#footnote-45) Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebh dahulu ada perencanaan.

 Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.[[46]](#footnote-46) Dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa terdapat ayat Al-Qur’an yang dikaitkan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan. Berikut ayat Al-Qur’an yang terdapat dalam surah Al-Israa’ ayat 36 yang berbunyi :

Artinya : “*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.*

 Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak boleh ditawar dalam proses perencanaan pembiayaan pendidikan, agar supaya tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sempurna.

 Perencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan pembiayaan pendidikan ini mencakup kegiatan penting yaitu penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) dan pengembagan Rencana Anggaran Pendapatan ddan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M).[[47]](#footnote-47)

1. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

 Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky dalam Nurdin Usman mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Brown dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.[[48]](#footnote-48)

 Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan sekolah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran sekolah.

 Kegiatan dari manajemen pembiayaan selain peencanaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan.[[49]](#footnote-49) Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Pencatatan keuangan juga dianjurkan dalam Al Qur’an seperti penggalan ayat Surat Al-Baqarah ayat 228 dibawah ini :

... ....

Artinya: *“….Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu)”.*

 Dalam ayat diatas dianjurkan untuk menulis bentuk transaksi keuangan agar lebih menguatkan persaksian dan tidak menimbulkan keraguan. Kepala sekolah hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, manfaat pembukuan kepada staf keuangan.

1. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

 Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.[[50]](#footnote-50)

 Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditujukan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. [[51]](#footnote-51)

 Sedangkan menurut Asmendri ada beberapa hal yang harus diperhatikn dalam fungsi pembiayaan :

1. Perencanaan tentang beberapa biaya yang diperlukan.
2. Dari mana dan bagaimana biaya itu dapat diperoleh atau diusahakan.
3. Bagaimana penggunaannnya.
4. Siapa yang akan melaksanakannya.
5. Bagaimana pembukuan dan pertanggungjawabanya.
6. Bagaimana pengawasannya.[[52]](#footnote-52)
7. **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**
8. **Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Perspektif Islam**

 Dalam islam, bahwa mengabdi dan ihsan (berbuat baik) pada masyarakat merupakan salah satu dari nilai-nilai *Insani dan Ilahi* , yakni suatu kebaikan dan kesempurnaan yang mengandung nilai yang sangat tinggi. Dorongan untuk memperhatikan keluarga terdekat dan orang yang membutuhkan tercantum jelas di dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 26, yang berbunyi :

آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : *“ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburkan (harta mu) secara boros”.*( Qs.Al-Isra: 26)

Dalam dalil Al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwasannya setiap orang lain mempunyai hak yang harus terpenuhi seperti hal nya hak untuk menempuh pendidikan, Biaya pendidikan yang tidak bisa dibayarkan oleh kalangan menengah kebawah itu merupakan salah satu faktor pemicu banyak nya anak usia sekolah yang putus sekolah. Oleh karena itu, dengan adanya program pemerintah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah itu merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak setiap warganya dalam bentuk pendidikan.

1. **Definisi Bantuan Operasional Sekolah**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebjakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan.[[53]](#footnote-53) BOS adalah program pemerintahan untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanan program wajib belajar.[[54]](#footnote-54) Jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS secara detail akan dibahas pada bagian berikutnya. Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Pada bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.[[55]](#footnote-55)

1. Biaya sarana pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi hal-hal berikut:
2. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
3. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
4. Bantuan biaya pendidikan, yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu mebiayai pendidikannya.
5. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
6. Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
7. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS BBM bidang pendidikan ini mencakup komponen untuk biaya operasional nonpersonal. Biaya operasional nonpersonal inilah yang diprioritaskan, bukan biaya kesejahteraan guru, dan bukan biaya untuk investasi.[[56]](#footnote-56)

1. **Tujuan BOS**

 Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk.

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.[[57]](#footnote-57)

Sedangkan Tujuan BOS pada tingkat SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:[[58]](#footnote-58)

1. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS.
2. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. **Sasaran Program BOS, Besar Bantuan BOS, dan Waktu Penyaluran Dana**

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD, SMP, SMA dan SLB baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Dalam buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah terdapat sekolah penerima BOS dengan ketentuan sebagai berikut.[[59]](#footnote-59)

1. Semua Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB. SMA/SMALB/ SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.di bawah pengelolaan Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemeritahan daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik.
2. Semua Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB. SMA/SMALB/ SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementterian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Semua Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB. SMA/SMALB/ SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Pusat atau pemerintahan daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan.
4. Semua Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB. SMA/SMALB/ SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOs yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu di Semua Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB. SMA/ SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

Dana BOS yang diterima siswa pertahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2018, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
2. SMP sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
3. SMA dan SMK sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) per 1(satu) peserta didik per 1(satu) tahun.
4. SDLB/SMPLBSMALB/SLB sebesar Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) per 1(satu) peserta didik per 1(satu) tahun

 Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.[[60]](#footnote-60)

1. **Organisasi Pelaksana**

 Menurut George R.Terry dalam Mulyono, Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antarpersonalia, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperloleh keputusan peribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.[[61]](#footnote-61)

 Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Didalam pengorganisasian terdapat pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian sehingga terciptalah adanya hubungan-hubungan kerjasama yang harmonisdan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.[[62]](#footnote-62)

Pelaksanaan suatu proyek atau program pada dasarnya ditentukan oleh komponen-komponen dari sistem kerja yang baik, dimana didalamnya disusun organisasi dan personalia (tenaga ahli) pelaksanaan sesuai dengan tanggung jawab yang ditumpu masing-masing.

Organisasi merupakan suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Secara normatif arti dari suatu organisasi adalah seluruh rangkaian proses kegiatan untuk menetapkan dan membagi habis pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan wewenang dan tugas, serta adanya penetapan hubungan antara unsur pelaksana dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam memudahkan dan memelihara efisiensi kerja, perlu disusun suatu organisasi pelaksanaan program. Pada dasarnya, penyusunan organisasi pelaksana tersebut menyangkut hubungan kerja antara pemberi tugas dan penerima/pelaksana pekerjaan. Hal ini dilakukan agar suatu program dapat berjalan lancar sesuai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Manajemen Sekolah.[[63]](#footnote-63)

a) Tim Pengarah

 Tim pengarah program BOS dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Tim pengawas tingkat puasat terdiri dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Keuangan; dan Menteri Dalam Negeri. Tim pengarah tingkat provinsi adalah Gubernur dan wakil Gubernur. Sedangkan tim pengarah tingkat kabupaten/kota yaitu Bupati/Walikota dan wakil Bupati/ wakil Walikota.

b) Tim Manajemen BOS Sekolah

 Tim manajemen BOS sekolah merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan BOS di sekolah. Baik dalam perencanaan penggunaan dana BOS sampai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab BOS di sekolah. Anggota tim manajemen BOS sekolah yaitu bendahara BOS dan satu wali siswa yang berkompeten di luar komite sekolah dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.

1. Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS Sekolah.
	1. Mengisi, mengirim dan meng-*update* data pokok pendidikan kedalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2. Memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah.
	3. Memverifikasi kesesuian jumlah danayang diterima dengan data peserta didik yang ada.
	4. Menyelenggarakan pembukuan lengkap.
	5. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan.
	6. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap.
	7. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima.
	8. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyataka bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS.
	9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.[[64]](#footnote-64)
	10. Tata tertib yang harus diikuti oleh tim manajemen BOS sekolah :
		1. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan.
		2. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap psemester.
		3. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah.
		4. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa.
2. **Prosedur Pelaksanaan BOS**
3. Proses Pendataan Pendidikan Dapodik

 Proses pendataan yang dilakukan sekolah antara lain menggandakan formulir data pokok pendidikan sesuai dengan kebutuhan, melakukan sosialisasi ke seluruh anggotasekolah (peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan) tentang tata cara pengisian formulir pendataan, dan kemudian membagikannya kepada seluruh individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkannya kembali data tersebut, memverifikasi kelengkapan dean kebenaran/kewajaran data profil semua unsur (sekolah, rombongan belajar, individu peserta didik, guru, dan tenaga kependidika, serta sarana dan prasarana), kemudian memasukan data ke dalam aplikasi Dapodik secara *offline* dan mengirimkannya ke *server* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara *online,* selain itu pihak sekolah wajib mem-*backup* seluruh data yang telah dimasukan *(entry)* dan wajib menyimpan formulir yang telah diisi secara manual untuk kepentingan monitoring/audit, melakukan update data secara regular ketika ada perubahan data minimal satu kali dalam satu semester, sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat untukm telah masuk, dan yang terakhir sekolah harus memastikan data yang masuk dalam Dapodik sudah sesuai dengan kondisi riil di sekolah.[[65]](#footnote-65)

1. Proses Penetapan Alokasi Dana BOS

 Dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS telah ditulis penetapan alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut.

* + - 1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan dan verifikasi data jumlah siswa tiap sekolah berdasarkan data individu siswa;
			2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
			3. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota/provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan;
			4. Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
			5. Alokasi dana BOS tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan proyeksi pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru;
			6. Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan);
			7. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2018 didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran 2017-2018, sedangkan periode Juli-Desember 2018 didasarkan pada data tahun pelajaran 2018-2019.
1. Penyaluran Dana BOS

Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah dilakukan dala dua tahap. Tahap pertama, penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Tahap kedua, penyaluran dari RKUD provinsi ke rekening sekolah.

Untuk penyaluran dana BOS sendiri berbeda antara daerah terpencil dan daerah yang tidak terpencil. Dalam buku petunjuk penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS tahun 2018 dituliskan bahwa dana BOS bagi daerah yang tidak tepencil disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap tiga bulan. Sedangkan dana BOS daerah terpencil disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap enam bulan atau semesteran.[[66]](#footnote-66)

Setelah dana masuk dalam rekening sekolah, maka dana tersebut dapat langsung diambil. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah. Pengambilan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun. Dana BOS dalam satu periode tidak harus habis digunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada setipa periode diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

1. **Penggunaan Dana BOS**
2. Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional, dan Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan diantaranya: (a) Pengembangan Perpustakaan, (b) Penyelenggaraan Kurikulum 2006, (c) Penerimaan Peserta Didik Baru, (d) Kegiatan Pembelajaran dan Eksstrakulikuler, (e) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, (f) Pengelolaan Sekolah, (g) Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga kependidikan, serta pengembangan Manajemen Sekolah, (h) Layananan Daya dan Jasa, (i) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah, (j) Pembayaran Honor, (k) Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran, (l) Biaya Lainnya.[[67]](#footnote-67)

1. Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS tidak bisa digunakan secara sembarang. Untuk itu pemerintah juga mencantumkan barang-barang ataupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan dengan dana BOS antara lain sebagai berikut.

1. Disimpan dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membeli *Sofware/*Perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *Sofware* sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang tidak terjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata, dan lainnya.
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya.
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
7. Mebiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidaang, dan lainnya.
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventariss sekolah).
9. Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat.
10. Membangun gedung/ruang baru, kecuali pada SD/SMp yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat.
11. Membeli Lembar Kerja (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
12. Menanamkan saham.
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/daerah atau sumber lainnya.
14. Membiayai iuran dalam rangka upcara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan.
15. Membiayai kegiatan dalam rangka ikut pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[[68]](#footnote-68)
16. **Monitoring dan Supervisi**

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervise. Pengawas bertanggung jawab tentang kefektifan program itu. Oleh karena itu, supervise haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.[[69]](#footnote-69)

Pengawasan merupakan pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh, sehingga tercapai hasil sesuai dengan program kerja. Fungsi tersebut mencakup antara lain:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari program kerja yang ditetapkan, dan meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan tersebut.
2. Membimbing dalam rangka peningkatan kemampuan kerja.
3. Memperoleh umpan balik tentang hasil pelaksanaan program kerja.
4. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pelaksanaan pengawasan hendaknya efisien untuk menjamin tercapainya relevansi dan efektivitas program.
6. Fungsi penilaian yang bertujuan telah tercapai sebagai umpan balik bagi perbaikan-perbaikan bagi program kegiatan selanjutnya.[[70]](#footnote-70)

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi dalam program BOS merupakan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Kegiatan monitoring dan supervise dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Kegiatan monitoring dan supervisi ini dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Komponen utama yang dimonitor antara lain: alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

1. **Laporan Pertanggungjawaban**

 Menurut Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program tiap tingkat (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak terkait. Secara umum, hal-haal yang dilaporkan oleh pelaksana program BOS adalah yang berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring dan pengaduan masalah.

 Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah adalah sebagai berikut.

* + - 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS.
			2. Membuat Pembukuan seperti buku Kas Umum, buku Pembantu Kas, buku Pembantu Bank, dan buku Pembantu Pajak.
			3. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana.
			4. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS.
			5. Mencantumkan bukti pengeluaran.
1. **Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu**

Dalam peningkatan mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun, banyak program yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta program tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta program tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 Tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:[[71]](#footnote-71)

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu.
2. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya.
3. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP.
4. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB.
5. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah.
6. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
7. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.
8. **Hasil Penelitian yang Relevan**

 Beberapa penelitian relevan tentang pengelolaan dana sekolah telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Tesis yang dibuat oleh Abdul Kadir Karding dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Di Kota Semarang, hasil penelitiannya mengingat program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah program BOS berpotensi meningkatkan akses masyarakat miskin/tidak mampu terhadap pendidika dasar. Pada dasarnya pelaksanaan program BOS tahun 2007 oleh lembaga sekolah SMP Negeri Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik artinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan BOS. Meskipun demikian hasil penelitian telah mengungkap masih terdapat beberapa kelemahan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian bagi kepala sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola dana BOS. Hasil Evaluasi ternyata BOS telah terungkap bahwa dana BOS tahun 2007 hampir semua 41 SMP Negeri Kota Semarang sebesar RP. 22.134.027.000,-. Dari jumlah tersebut ternyata yang paling besar adalah 30% untuk pembayaran honorer/GTT/PTT, Tenaga Harlep, 25% untuk belanja barang dan jasa, 20% untuk kegiatan belajar mengajar, (15%) kegiatan kesiswaan dan 10% pemeliharaan gedung.[[72]](#footnote-72)
2. Jurnal yang dibuat oleh Fauzan yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah”, Hasil Penelitiannya tata kelola perusahaan yang baik (GGC) sebagai fitur penting yang memebentuk sebuah organisasi. Oleh karena itu, untuk mememahami identitas perusahaan, harus mengetahui peran tata kelola perusahaan yang baik pada waktu yang sama. GCG berfungsi sebagai identitas dan juga perencanaan strategis organisasi dengan tidak memebrikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat menggunakan GCG sebagai cara untuk memahami identitas organisasi juga dapaat menggunakan alat untuk membangun identitas organisasi mereka.[[73]](#footnote-73)
3. Jurnal yang di buat Nurul Hariswati yang berjudul “Analisa Akuntabilias dan Transparasi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program BOS”, hasil penelitiannya bahwa pada prinsip akuntabilitas yang sudak diimplemntasikan di satuan pendidikan besar mempunyai interpretasi berbeda antara pelaksanaan teknik dan pengambilan keputusan (bendahara dan kepala madrasah). Hasil ini terlihat bahwaa indicator dari beberapa kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran mempunyai sakala prioritas yang berbeda. Skala prioritas akuntabilitas informan berdasarkan hasil pengukuran nilai kepentingan antara bendahara dan kepala madrasah mempunyai nilai yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara pelaksanaan teknis dari pihak pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan dan kebijakan keuangan.[[74]](#footnote-74)
4. **Kerangka Berpikir**

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis tentang penerapan kebijakan Bantuan Operasioanal Sekolah di SMP Ihsaniyah. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Indonesia. Serta menyusun kebijakan-kebijakan lain yang mendukung dan memudahkan terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas termasuk adanya kebijakan gratis dengan adanya dana BOS.

Adanya dana BOS diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak terjadi begitu saja, tetapi perlu dibentuk dengan baik, direncanakan, digali sumber dayanya, dibiayai, diciptakan iklim organisasinya diawasi pelaksanaannya, dan dikelola secara professional. Mutu pendidikan merupakan gabungan dari berbagai unsur, baik unsur guru, kurikulum, manajemen sekolah, keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Tanpa ada kemauan untuk menjadikan mutu sebagai perioritas yang harus didanai dalam penyelenggaraan pendidikan maka. Mutu pendidikan mengacu pada aspek jasa dan pelayanan dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya program BOS diharapkan sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, sehingga dapat membuat mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana jasa dan pelayanan sekolah dalam proses belajar mengajar.

Penggunaan dana BOS telah diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program BOS yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun. Di dalamnya terdapat berbagai hal yang mengatur tentang pelaksanaan program BOS, seperti hal-hal yang boleh dibiayai dan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BOS serta bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

Dengan adannya dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa. Dana BOS juga diperuntukan untuk menambah fasilitas sekolah yang belum ada, sehingga dapat membantu tanaga pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Keberadaan fasilitas sekolah yang memadai juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga siswa dapat langsung mempraktekan apa yang dapat dari pelajaran yang dipelajari. Sesuai uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

Ketentuan BOS (Petunjuk Teknis dan Petunjuk Penggunaan dana BOS tahun 2018)

Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Tenaga Pendidik

Sarana Prasarana

Kemampuan dan Layanan Belajar

Kondisi Faktual Implementasi Program BOS di lapangan

 Kesesuaian Implementasi Program BOS

 Sumber : PP Nomor. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**
2. Tempat Penelitian

 Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan.Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Ihsaniyah Kota Serang Provinsi Banten. Terletak berada pada lokasi yang sangat strategis. Karena, sekolah itu berada di pinggir jalan dan berada ditengah perkotaan, beralamatkan di Jl. Mayor Safei No.51, Lontarbaru, Kec.Serang, Kota Serang, Banten. Kode Pos 42112. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ditempat ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program Bantuan Operasional Sekolah.
2. Mendapatkan izin dari pihak sekolah
3. Lokasi penelitian sangat strategis, sehingga memudahkan penulis dalam kegiatan penelitian.
4. Waktu Penelitian

 Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penjadwalan penelitian diperkirakan akan berlangsung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan Februari 2019.

**Tabel 3.I**

**Jadwal Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Waktu |
| 2018 | 2019 |
| Jun  | Jul  | Ags  | Sept  | Okt  | Nov  | Des  | Jan  | Feb  |
| 1 | Pengajuan judul dan penetapan variabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bahan-bahan literatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pembuatan proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pelaksanaan penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengumpulan data dan penyelesaian skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sidang skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Metode Penelitian**

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.[[75]](#footnote-75)

Metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, dan prosedurnya bagaimana.[[76]](#footnote-76)

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Lichtman dalam Darwyansyah adalah suatu cara untuk mengetahui (sesuatu) dimana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring.[[77]](#footnote-77) Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelittian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati.[[78]](#footnote-78)

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

1. **Instrumen Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Darwiyansyah, penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistemastis sehingga mudah diolah. Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan data yang empiris sebagaimana adanya.[[79]](#footnote-79)

 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah orang atau *human instrument*, yakni peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah penelitian, yakni Implementasi Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah.

 Selain itu, hal-hal yang terdapat di dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang belum jelas dan pasti masalahnya, sumber data, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Nasution dalam Sugiyono, menyatakan penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama.[[80]](#footnote-80) Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya serta dirasa perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti, peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya alat yang dapat mencapainya.

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Observasi

 Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan . Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi secara terang-terangan, yaitu observasi yang melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data atau informan bahwa sedang melakukan penelitian. [[81]](#footnote-81)

1. Wawancara

 Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Peneliti adalah pewawancara dan sumber data adalah orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*) adalah wawancara yang terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni Implementasi Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah.

 Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2 Kisi-Kisi instrument pedoman wawancara**

|  |  |
| --- | --- |
| Aspek | Indikator |
| Implementasi Program BOS | Organisasi pelaksana |
| Prosedur pelaksana BOS |
| Penggunaan dana BOS |
| Laporan dan pertanggungjawaban  |
| Penyelenggaraan Pendidikan  | Tenaga pendidik |
| Kemampuan dan layanan belajar Murid |
| Sarana dan prasarana |

Sumber : Petunjuk Teknis BOS 2018

Sedangkan data sekunder diambil dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumentasi yang antara lain :

1. Studi dokumentasi

 Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari dokumen resmi dan relevan dengan penelitian yang berupa tulisan, gambar, foto, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selain itu dokumentasi juga catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, catatan-catatan serta menghimpun dokumen-dokumen dan menganalisisnya dengan masalah yang diteliti.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan, digunakan untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. Kamera, digunakan untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.
3. **Informan Penelitian**

 Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi hal yang sangat penting karena informan merupakan sumber data kualitatif. Informan kunci yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah dari Struktur Pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, dan Dewan Guru. Sedangkan informan sekunder terdiri dari unsur komite sekolah dan orang tua murid di SMP Ihsaniyah.Kategori informan kunci dan informan sekunder dalam penelitian lebih lanjut diuraikan pada tabel dibawah ini :

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai informan dalam pengumpulan data, peneliti akan bekerja sama dengan kepala sekolah dalam mengumpulkan data untuk mengetahui pengelolaan dana BOS dan hal lain yang mengaitkan tentang hal yang akan diteliti di SMP Ihsaniyah dari mulai berdiri hingga saat ini dengan segala perkembangannya, serta bagaimana Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di sekolah tersebut.

1. Bendahara BOS

Bendahara BOS sebagai informan utama selaku Tim Manejemen BOS sekolah, dalam memperoleh data mengenai Implementasi Bantuan Operasional Sekolah, peneliti akan bekerja sama dengan Bendahara BOS dalam mendalami bagaimana pengelolaan BOS di sekolah tersebut.

1. Guru

Bendahara BOS sebagai informan , dalam memperoleh data mengenai Implementasi Bantuan Operasional Sekolah, peneliti akan bekerja sama dengan guru dalam mendalami bagaimana pengelolaan BOS di sekolah tersebut dan adakah pengaruh terhadap mutu penyelenggaraan penddidikan di sekolah.

1. Komite Sekolah

Komite Sekolah sebagai informan, dan juga menjadi salah satu Tim Manajemen BOS sekolah dari unsur masyarakat. Penelti akan bekerja sama dengan komite sekolah dalam mendalami bagaimana Implementasi Program BOS di sekolah, dan apa peran Komite Sekolah di dalamnya.

1. Orang Tua

Orang Tua sebagai informan, yang merupakan salah satu pegguna atau yang merasakan adanya program BOS di sekolah ini. peneliti akan bekerja sama dengan orang tua murid dalam menggali informasi sejauh mana mereka mengetahui adanya dana BOS.

**Tabel 3.3 Informan Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis**  | **Informan**  | **Kode** |
| *Key Informan*  | Kepala Sekolah  | I1 |
| Bendahara  | I2 |
| Guru  | I3 |
| Secondary Informan  | Komite sekolah  | I4 |
| Wali murid | I5 |

1. **Tehnik Analisis Data**

Tehnik analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.[[82]](#footnote-82)

Miles dan Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display,* dan *conclusion drawing/verification.[[83]](#footnote-83)*

**Gambar 3.3**

**Komponen Analisis Data (*Interactive Model)* dari Miles**

**dan Huberman**

Sumber : Sugiyono ( Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,

 dan R&D)[[84]](#footnote-84)

Kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction)*

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Reduksi data juga berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu utnuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

1. Penyajian data (*Data Display*)

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Men*display*kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

1. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusions drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalalh penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1. **Validitas dan Reliabilitas Data**

 Validitas menurut Walizer dalam Darwyansyah adalah tingkat kesesuaian antara suatu batasan konseptual yang diberikan dengan bantuan operasional yang telah dikembangkan. Validitas suatu instrumen banyak dijelaskan dalam konteks penelitian sosial yang variabelnya tidak dapat diamati secara langsung, seperti sikap, minat, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya.[[85]](#footnote-85)

 Reliabilitas dalam riset kualitatif adalah tingkat sejauh apa sebuah instrument riset seperti angket/kuesioner, ketika digunakan lebih dari sekali akan memproduksi hasil atau jawaban yang sama. Namun dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument utamanya.[[86]](#footnote-86)

 Uji keabsahan data yang digunakan oleh penulis yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber lainnya pada saat yang berbeda, atau membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber dengan pendekatan yang berbeda, untuk mengecek atau membandingkan data penelitian yang telah dikumpul. Triangulasi didalam penelitian ini juga peneliti melaksanakan wawancara ulang pada sumber yang sama dengan gaya yang berbeda.[[87]](#footnote-87) Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.[[88]](#footnote-88) Triangulasi dilakukan oleh penulis untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda, data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan studi dokumen.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum SMP Ihsaniyah**

 Berawal dari sebuah yayasan yang bernama yayasan pendidikan islma Sholeh Ma’mun telah berdiri pula lembaga pendidikan tingkat SMP yaitu SMP Ihsaniyah. SMP Ihsaniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dibangun oleh yayasan ini selain SMP Ihsaniyah yayasan ini pula membangun lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Sekolah ini merupakan sekolah yang sudah lama atau bisa disebut dengan sekolah SMP swasta tertua di Kota Serang berdiri sejak tahun 1980 kemudian baru mendapat SK pendirian sekolah pada tahun 1984. SMP Ihsaniyah beralamatkan di Jl.Mayor Syafei Nomor.51 Desa Lontarbaru Kecamatan Serang Povinsi Banten Kode Pos 42115.

 Sekolah ini memilki luas tanah 2.500 M2, bangunan sekolah ini bergabung dengan bangunan sekolah MTs dan MA Ihsaniyah. Kurikulum yang diterapkan oleh sekolah ini yaitu memakai kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan waktu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan pada pagi hari pukul 07.00-13.10. SMP Ihsaniyah ini merupakan lembaga pendidikan yang dibangun untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau dari kalangan keluarga menengah kebawah yang ada disekitarnya agar mereka mau untuk melanjutkan pendidikan nya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.[[89]](#footnote-89)

 SMP Ihsaniyah memiliki Visi sekolah yaitu untuk mencetak manusia yang ber iman dan taqwa (IMTAQ) dan ber ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK) serta berakhlaqul Karimah, selain Visi sekolah ini pun memiliki Misi sekolah diantaranya : (1) mempersiapkan generasi yang bermutu dan berdaya guna. (2) mempersiapkan generasi yang berkarakter religius, (3) menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara aktif, kreatif dan efisien (pakem). (4) mengembangkan dan mewujudkan peserta didik untuk berakhlakul karimah, beriman dan bertakqwa kepada Allah SWT.

 Data tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Ihsaniyah per tahun 2019 memiliki 10 tenaga pendidik di antaranya 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sedangkan untuk tenaga kependidikan berjumlah 2 orang, terdiri dari 1 orang laiki-laki dan 1 orang perempuan. Sedangkan, data peserta didik per tahun 2019 berjumlah 111 orang yang terbagi ke dalam 6 Rombongan Belajar (Rombel) di antaranya: kelas VII A (18 orang), 15 orang, kelas VIII A (20 Orang), kelas VIII B (18 orang), kelas IX A (21 orang), kelas IX A (21 orang), kelas IX B (19 orang). Sarana Prasarana yang dimiliki sekolahan ini per tahun 2019 diantaranya: 6 ruang kelas, 1 ruang laboratorium, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, dan 1 ruang ibadah.[[90]](#footnote-90)

1. **Hasil Penelitian**

 Adapun hal-hal yang penulis sajikan dalam hasil penelitian ini adalah Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Ihsaniyah. Kemudian pembahasan disini meliputi: Implementasi Program BOS dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan.

1. **Implementasi Program BOS di SMP Ihsaniyah**
2. **Organisasi Pelaksanaan Program di SMP Ihsaniyah.**

 Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam memudahkan dan memelihara efisiensi kerja, perlu disusun suatu organisasi pelaksanaan program. Pada dasarnya, penyusunan organisasi pelaksana tersebut menyangkut hubungan kerja antara pemberi tugas dan penerima/pelaksana pekerjaan. Hal ini dilakukan agar suatu program dapat berjalan lancar sesuai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

 Organisasi pelaksana program BOS di SMP Ihsaniyah ini terdiri dari beberapa unsur yaitu bapak sendiri selaku Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan beberapa dewan guru yang terlibat seperti yang ditunjuk sebagai Bendahara BOS, untuk dari unsur orang tua siswa itu hanya komite sekolah yang terlibat di dalamnya. Untuk kualifikasi pendidikan dan pengalaman staf itu sama saja hanya tidak ada yang khusus hanya saja kalau operator sekolah itu harus menguasai komputer dan memiliki sertifikat komputer karena seorang operator itu tugas nya harus bisa mengolah data menggunakan komputer, untuk staf yang lain mereka rata-rata lulusan S1.[[91]](#footnote-91)

 Tim Manajemen BOS di SMP Ihsaniya ini diantaranya : kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya, bendahara saya sendiri, komite sekolah pak saefullah, dan dari orang tua siswa bu Aliyah. Di SMP Ihsaniyah tidak ada kualifikasi khusus untuk Tim manajemen BOS sekolah hanya sebatas guru rata-rata lulusan S1 yang diberi tugas tambahan sebagai tim manajemen BOS sekolah.[[92]](#footnote-92)

 Tim Manajemen BOS di sekolah ini yaitu, ibu Lilis sebagai bendahara, kepala sekolah, operator/sekretaris, dan komite sekolah. Pembentukan organisasi/manajemen program BOS dilakukan pada saat rapat bersama yang dilakukan oleh dewan guru dan kepala sekolah didasari atas kesepakatan semua dewan guru.[[93]](#footnote-93)

 Kalau untuk struktural itu kepala sekolah dengan panitia yang tealah di SK kan diantaranya: kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Pembentukan yang biasa dilakukan itu dengan cara rapat ditujuk oleh kepala sekolah.[[94]](#footnote-94)

 Biasanya untuk cara pembentukan struktur organisasi/manajemen program BOS biasanya kita tunjuk di dalam rapat, nanti saya selaku kepala sekolah yang akan menujuk dan nanti kembali lagi kepada mereka siap atau tidak menjadi tim manajemen BOS di Sekolah, tugas terberat di struktur ini yaitu sebagai bendahara karena mengelola langsung keuangannya dan membuat laporan keuangan yang rumit, jadi biasanya yang ditunjuk sebagai bendahara ini yang kebanyakan tidak siap karena tanggung jawab yang sangat berat.[[95]](#footnote-95)

 Penunjukan langsung oleh kepala sekolah merupakan cara pembentukan organisasi Tim manajemen BOS di SMP Ihsaniyah ini dilaksanakan di dalam rapat guru dan penunjukan ini berdasarkan kemampuan dan kepercayaan orang yang ditunjuk kemudian disetujui oleh dewan guru yang lainnya.[[96]](#footnote-96)

1. **Prosedur Pelaksanaan BOS di SMP Ihsaniyah**

Untuk proses penyaluran dana BOS itu dari tingkat pusat, ke tingkat provinsi, ke tingkat kota, baru lah sampai di sekolah, untuk SMP sendiri itu di bawah naungan Dinas Pendidikan. Biasanya untuk mekanisme pengambilan dana BOS dari pihak sekolah itu langsung ke bank diambil oleh Kepala Sekolah dan Bendahara yang mempunyai kuasa dalam pengambilan dana BOS. Persyaratannya dana tersebut tidak diambil semua hanya per 3 bulan saja, selain itu harus mengirim laporan bulan-bulan sebelumnya, kalau di sekolah ini belum mengirimkan laporan itu akan berpengaruh terhadap pencairan dana BOS dan berdampak ke sekolah lainnya, dari pihak dinas pun selalu mewanti-wanti satu saja sekolah yang belum mengirimkan laporan itu akan terhambat kepada yang lainnya, maka dari itu telat atau tidaknya pencairan dana BOS tergantung pada laporan yang kita kirim.[[97]](#footnote-97)

 Biasanya BOS itu cairnya 3 bulan sekali, dari pihak pusat itu langsung ke rekening sekolahnya. Bendahara dan kepala sekolah yang mempunyai kuasa untuk mengambil dana BOS langsung ke bank BJB, kalau misalkan kita tahu dana itu suah cair langsung kita ambil sesuai dengan kebutuhannya biasanya kalau telat pencairannya ketika cair kita ambil semuanya, untuk pemberitahuan sudah cair itu dalam rapat para kepala sekolah kemudian setelah itu adanya MOU dengan manajer BOS kota Bendahara, dan kepala sekolah serta menyertakan KTP dan rekening selain itu tidak boleh ada yang mengambilnya kecuali ada yang berhalangan bisa diberi surat kuasa dari pihak sekolah.[[98]](#footnote-98)

 BOS itu disalurkan sesuai dengan program, pencairan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari perintah biasanya 2-3 bulan sekali. Di SMP Ihsaniyah untuk proses pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara dan kepala sekolah selain itu tidak ada.[[99]](#footnote-99)

 Di SMP Ihsanyah untuk penyaluran dana BOS itu disalurkan sesuai dengan program, pencairan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari perintah biasanya 2-3 bulan sekali. Bendahara dan kepala sekolah selain itu tidak ada.[[100]](#footnote-100)

 Menurut Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Menurut Data Dapodik yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan besaran dana yang akan di terima oleh pihak sekolah, untuk tingkat SMP besaran yang diberikan yaitu Rp. 1.000.000,00/siswa (satu juta rupiah) dan besaran dana BOS yang diberikan oleh pemerintah ke pihak sekolah harus tepat jumlahnya.

 Selama SMP Ihsaniyah ini menerima dana BOS dan selama saya menjabat menjadi kepala sekolah dana yang di terima oleh sekolah itu tepat jumlahnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00/siswa (satu juta rupiah), karena pihak sekolahnya langsung yang menerima dana tidak dari tangan ke tangan jadi tidak ada pemotongan dari pihak mana pun.[[101]](#footnote-101)

 Jumlah yang diterima sesuai dengan Dapodik , dari pihak sekolah nanti melaporkan jumlah siswa yang ada melalui Dapodik , besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang ada, untuk tingkat SMP besarannya Rp.1.000.000/ siswa/tahun. Biasanya kita mendapatkan dana BOS pertriwulan itu mencapai Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) jumlah siswa yang ada harus diperbaharui tiap bulannya karena khawatir ada siswa yang masuk atau keluar.[[102]](#footnote-102)

1. **Penggunaan Dana BOS di SMP Ihsaniyah**

 Di SMP Ihsaniyah tahap awal untuk merencakan penggunaan dana BOS yaitu dengan membuat Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) di dalam rapat Tim manajemen BOS sesuai dengan anggaran yang ada. Komponen yang bisa dibiayai oleh dana BOS biasannya honor guru, dan kegiatan siswa sepertihalnya: Pramuka, marawis, olahraga, perlombaanperlombaan, pentas seni. Setelah mendapatakan dana BOS ada koordinasi dengan yang lainnya mengenai jumlah yang diterima apalagi dengan komite sekolah yang harus ikut menandatangani berkas pengambilan dana BOS.

 SMP Ihsaniyah memprioritaskan anggaran dana tersebut untuk kegiatan siswa dalam membuat rencana anggaran karena dana BOS itu untuk operasional sekolah diantaranya titik beratnya itu ada dikegiatan siswa, dengan honor guru, serta pemeliharaan. Untuk pembelian barang tidak boleh dari 10% untuk satu barang, tidak boleh lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setiap pembelian barang harus menggunakan nota yang jelas, untuk mekanisme kita mengikuti petunjuk teknis BOS yang ada saja.[[103]](#footnote-103)

 Sekolah mengikuti Juknis yang diberikan oleh pemerintah, dan dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) yang dibuat setiap 3 bulan sekali yang kemudian dibahas di dalam rapat bersama dewan guru lainnya, biasanya anggaran dana yang kita terima itu kurang memenuhi kebutuhan operasional kita, anggaran tersebut kebanyakan habis untuk membiayai gaji honorer dan beberapa kegiatan siswa lainnya.

 Kita melihat yang ada di Juknis 8 Standar Nasional Pendidikan, diantaranya standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, di dalam juknis itu ada beberapa komponen yang dapat dibiayai oleh dana BOS seperti halnya membayar honor guru, mebeli buku paket, pemeliharaan bangunan dan lain sebagainya. Tim manajemen BOS sekolah mengkoordinasikan dengan yang lainnya tapi bukan melalui rapat resmi melainkan melalui obrolan biasa antar guru yang memberitahu bahwa dana BOS telah cair sekian.

 SMP Ihsaniyah Biasanya kalau disekolah kita karena dana BOS yang diterima juga sedikit rata-rata anggaran yang kita prioritaskan hanya untuk honor guru saja mencapai Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari total dana BOS yang sekolah dapaatkan sebanyak Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) baru sisanya untuk kegiatan lainnya seperti halnya untuk kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan yang lainnya. Untuk mekanisme pembelian barang kita menyesuaikan yang sudah ada di RKAS kemudian setelah dianggarkan kita beli barangnya, pembelian barang tesebut harus disertakan nota resmi dan boleh membeli dimana saja. Dan barang yang sudah kita beli harus diberi tanda bahwa itu inventaris sekolah.[[104]](#footnote-104)

 Sesuai dengan operasional petunjuk BOS, dan dituangkan ke dalam RKAS yang di buat pada tahun ajaran baru. Komponen yang dibiayai sesuai dengan komponen Standar Nasional Pendidikan diantranya ada standar isi, standar proses, standar pembiayaan dan lain-lain. Pemanfaatannya tidak dikoordinasikan dengan yang lainnya karena itu sudah menjadi aturan baku dalam petunjuk teknisnya.[[105]](#footnote-105)

 Sekolah merencanakan penggunaan dana BOS untuk kegiatan sekolah, dan peralatan yang perlu diperbaharui. Biasanya untuk peralatan sekolah, biaya listrik, wifi, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Saya kurang tahu untuk pengordinasian yang lebih tahu dari pihak bendaharanya, guru diluar Tim manajemen BOS hanya tahu hasil akhirnya saja.[[106]](#footnote-106)

 Ada saja hambatan yang dirasakan oleh Tim manajemen BOS dalam mengelola dana BOS seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah dan Bendahara BOS yang menjadi organisasi inti dalam pengelolaan dana BOS.

 Hambatannya yang dirasaakan sekolah selama mengelola dana BOS hanya keterlambatan pencairannya saja karena tiga bulan sekali turunya sehingga kalau ada keterlambatan maka akan berpengaruh terhadap kegiatan siswa, dan juga honor guru karena kita membayar honor guru itu dari dana BOS kalau terlambat maka guru pun tidak akan di bayar, kalau dalam hal pelaporan yang sering menjadi hambatan itu yah biasanya tanda buktinya itu yang sering hilang karena dari bendaharanya kurang menyimpannya dengan rapi.[[107]](#footnote-107)

 Sama seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah Bendahara BOS pun mengungkapkan seperti itu, Hambatan dalam pelaksanaan program BOS di sekolah sendiri untuk sementara ini tidak ada, mungkin hambatan yang sering kita alami itu karena telatnya pencairan dana BOS dari pusat, sehingga dapat berakibatkan terhambatanya kegiatan yang lainnya dikarenakan biaya yang tidak ada.[[108]](#footnote-108)

 Dengan adanya program BOS sekolah dapat memenuhi kebutahan operasionalnya, sekolah bisa merencanakan program-program kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan tepat dan akurat. Walaupun di SMP Ihsaniyah ini sendiri anggaran lebih besar dipakai untuk membayar honor guru, akan tetapi ada program-program yang adapat terlaksana melalui dana BOS

1. **Monitoring dan Supervisi di SMP Ihsaniyah**

 Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervise. Pengawas bertanggung jawab tentang kefektifan program itu. Oleh karena itu, supervise haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, monitoring dan supervise dilakukan oleh beberapa tingkat yaitu: Tim BOS Pusat, Tim Bos Provinsi, Tim BOS Kota/Kabupaten. Untuk Tim BOS sekolah dimonitoring langsung oleh Tim BOS Kota/Kabupaten.

 SMP Ihsaniyah dimonitoring oleh Tim BOS Kota Serang, biasanya dari Dinas Kota datang ke sekolah untuk melakukan pengawasan. Tim BOS Kota biasanya hanya mengawasi atau mengecek laporan dan memastikan tidak ada hambatan dan kesalahan dalam melakukan pelaporan.[[109]](#footnote-109)

 Dari pihak Dinas Kota yang biasanya mengawasi ke sekolah setiap 6 bulan sekali atau setiap semester dilakukannya pengawasan, hal-hal yang sering dimonitoring antaralain laporan keuangan dan bukti-bukti pembelian barang.[[110]](#footnote-110)

 Dari instansi yang berkaitan seperti halnya MTs oleh Kemenag Kota dan untuk SMP oleh Dinas Kota. Tidak menentu untuk jadwal monitoring.[[111]](#footnote-111) Ada monitoring dari luar yaitu dari Dinas Kota yang datang ke sekolah. Biasanya dilakukan setiap bulan, karena untuk merealisasi sesuai dengan RKAS nya.[[112]](#footnote-112)

 Selain pengawasan dari luar sekolah, dari dalam sekolah pun harus diadakannya pengawasan peran komite sekolah disini harus bisa diandalkan menjadi pengawas dari dalam sekolah yang mewakili unsur masyarakat (orang tua siswa).

 Di SMP Ihsaniyah ini ada juga pengawasan dari dalam sekolah yang dilakukanan oleh komite sekolah, biasanya komite sekolah melakukan pengawasan setelah dana BOS dicairkan oleh pemerintah. Komite sekolah mengawasi bendahara untuk mengawasi penyaluran dan keungannya karena komite sekolah ini sudah berpengalaman dalam menyalurkan dana BOS.[[113]](#footnote-113)

 Sedangkan menurut Bendahara BOS, tidak pernah ada pengawasan dari dalam sekolah yang dilakukan oleh komite sekolah, komite sekolah hanya sebatas ikut menandatangin saja dan hanya sekedar tahu adanya dana BOS, untuk hal-hal yang lainnya komite sekolah di SMP Ihsaniyah ini kurang ikut serta dalam mengelola dana BOS.[[114]](#footnote-114)

 Komite sekolah ikut mengawasi pengelolaan penggunaan dana BOS di sekolah, hal-hal yang biasanya di monitoring yaitu masalah pelaporan dari bendahara mengenai keuangan dan bukti-bukti fisik pembayaran kegiatan sekolah.[[115]](#footnote-115)

1. **Laporan dan Pertanggungjawaban di SMP Ihsaniyah**

Dalam pelaksanaan program BOS, sekolah harus mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap pemerintah ialah dengan membuat laporan tertulis, selain diserahkan kepada Dinas, sekolah juga harus melaporkannya kepada orang tua siswa ketika rapat akhir tahun.

 Sekolah biasanya melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk online laporan ini hanya secara globalnya saja yang dikirimkan langsung ke pusat setelah itu yang offline itu berupa tanda bukti. Laporan dikirim setiap 2-3 bulan sekali, untuk laporan *online* setelah dana BOS keluar langsung pihak sekolah menguploadnya. Sedangkan untuk yang *offline* harus menyertakan tanda bukti pembelian barang, dan RKAS.[[116]](#footnote-116)

 Pelaporannya dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setiap 3 bulan sekali, Sistem pelaporan pelaksanaan penggunaan dana BOS terbagi menjadi 2 yaitu sistem *online* yang dilaporkan langsung ke pusat, dan sistem *offline* yang dilaporkan ke Dinas Kota dengan melampirkan bukti fisik. Hal-hal yang harus dilaporkan itu sesuai dengan Juknis dan menyertakan bukti fisik.[[117]](#footnote-117)

 Dalam bentuk tulisan seperti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan untuk laporan *online* langsung dikirim ke pihak pusatnya.[[118]](#footnote-118) Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS itu dalam bentuk tulisan laporan *offline* yang langsung dikirim oleh bendahara, dan laporan online yang langsung dikirim ke pusat melalui aplikasi yang telah disediakan.[[119]](#footnote-119)

1. **Penyelenggaraan Pendidikan**

SMP Ihsaniyah memiliki beberapa sarana dan prasaran untuk menunjang penyelenggraaan pendidikan diantranya : Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, bangku sekolah, lapangan, WC, dan ruang ibadah.Untuk alat peraga yang dimiliki sekolahMasih kurang memadai, hanya ada beberapa alat peraga yang dimiliki sekolah seperti halnya untuk pelajaran IPS ada peta dan globe.Para guru di SMP Ihsaniyah ini pun mereka sudah memanfaatkan alat peraga yang ada.[[120]](#footnote-120)

Perpustakaan, musholah, laboratorium, ruang kelas, lapangan, WC Untuk alat peraga masih belum cukup memadai hanya ada beberapa dan itu pun sudah tidak layak , kalau untuk alat peraga yang ada pasti dimanfaatkan.[[121]](#footnote-121)

Selain sarana dan prasarana adapula kemampuan dan layanan belajar dalam penyelenggaraan pendidikan, kami meyediakan buku paket untuk membantu siswa dalam belajar. Untuk menggali potensi siswa guru juga sering memancing potensi anak dalam pembelajrannya , kita juga sering mengamati siapa saja yang memiliki bakat terpendam, akan tertapi dari pihak sekolah belum mengadakan upaya untuk menggali potensi paara siswanya.[[122]](#footnote-122)

SMP Ihsaniyah ini menyediakan buku paket tapi diluar dana BOS. Melalui seni, olahraga, dan kegiatan lainnya dan melalui penyediaan ekstrakulikuler yang memiliki Pembina masing-masing itu lah upaya sekolah untuk menggali potensi siswa, kebetulan di sekolah ini prestasi yang paling condong itu dibidang olahraga cabang futsal. Untuk fasilitas pihak sekolah hanya menyediakan alat-alat nya saja kalau untuk ruangan biasanya di sini memakai ruang kelas untuk latihan kecuali untuk olahraga itu sudah ada lapangan.[[123]](#footnote-123)

 Semua dibebaskan akan tetapi baru-baru ini ada usulan lagi dari pihak sekolah karena dana yang diterima pun tidak cukup maka dipungut biaya SPP dari wali murid.[[124]](#footnote-124) Semua dibebaskan kecuali untuk kepentingan pribadi seperti halnya seragam, LKS, dan sebagainya.[[125]](#footnote-125)

Dari pernyata diatas, upaya sekolah dalam mennggali potensi siswa masih kurang, sekolah hanya mengandalkan kegiatan ekstrakulikuler dalam menggali potensi siswa, dan fasilitas untuk siswa dalam mengembangkan potensinya belum tersedia dengan baik. Oleh karena itu, siswa hanya memanfaatkan fasilitas yang ada saja.

SMP Ihsaniyah ini walaupun berada di tengah perkotaan akan tetapi latar belakang siswa rata-rata dari keluarga menengah ke bawah.Mayoritas latar belakang siswa dari keluarga menengah kebawah yang pekerjaan orang tuanya hanya buruh, ojeg, asisten rumah tangga dll.[[126]](#footnote-126)

Begitu pula dengan pernyataan dari Bendahara BOS yang menyatakan bahwa, Latar belakang mayoritas siswa yang ada disini dari kalangan menengah ke bawah seperti halnya pekerjaan orang tua nya sebagai pembantu, tukang becak dan lainnya.[[127]](#footnote-127)

Selain pernyataan dari pihak sekolah, pernyataan yang sama pun dilontarkan oleh pihak orang tua siswa, Kebanyakan latar belakang siswa disini dari keluarga menengah kebawah, oleh karena itu juga dana BOS sangat dibutuhkan di sekolah ini, kebanyakan profesi nya itu sebagai buruh, tukang becak, dan pedagang kelontong.[[128]](#footnote-128)

Dari latar belakang siswa di SMP Ihsaniyah, program BOS ini sangat penting sekali bagi mereka, karena dengan adanya dana BOS mereka mampu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Walaupun sepenuhnya biaya belum bisa di gratiskan oleh pihak sekolah setidaknya dapat meringankan biaya pendidikan siswa.

 Dan dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah pemerintah mengharapkan dapat memudahkan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan. Setelah adanya dana BOS siswa dapat memperoleh kemudahan layanan pendidikan karena sudah terbebas dari biaya, fasilitas-fasilitas juga sudah disediakan oleh pihak sekolah, dan banyak kemudahan lainnya.[[129]](#footnote-129)

 Dengan adanya dana BOS siswa pun memperoleh kelancaran dan kemudahan dalam layanan pendidikan.[[130]](#footnote-130) Alhamdulilah dengan adanya dana BOS, pelayanan kebutuhan sekolah itu terpenuhi walaupun belum semuanya, karena tidak harus menunggu uang bayaran dari orang tua siswa.[[131]](#footnote-131)

1. **Pembahasan**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebjakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan.[[132]](#footnote-132) Program BOS merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. SMP Ihsaniyah termasuk salah satu sekolah swasta yang melaksanakan program BOS di Kota Serang. Sekolah menerima bantuan dana dari pemerintah untuk dikelola sebaik mungkin demi tercapainya tujuan program BOS itu sendiri. Di SMP Ihsaniyah itu sendiri dana BOS merupakan sumber utama pendapatan sekolah untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Tujuan khusus diadakannya program BOS itu ada tiga butir. Pertama, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD dan SMP terhadap biaya operasional sekolah. Kedua, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeeri maupun swasta. Ketiga, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa swasta.

Pelaksanaan program BOS tidak serta merta dilaksanakan berdasarkan keinginan dan kebutuhan sekolah. Untuk itu, pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis penggunaan dan pertangggungjawaban keuangan dana BOS dalam setiap tahunnya. Dalam buku petunjuk tersebut sudah jelas tertulis aturan-aturan pelaksanaan program mulai dari dasar penyelennggaraan program BOS, tujuan BOS, sasaran, pelaksanaan program, prosedur pelaksanaan BOS, komponen yang dapat dibiayai oleh dana BOS, larangan penggunannya, sampai pada monitoring dan laporan pertanggungjawabannya, termasuk pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program BOS di sekolah tersebut.

Menurut Asmendri, Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Didalam pengorganisasian terdapat pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian sehingga terciptalah adanya hubungan-hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.[[133]](#footnote-133)

Untuk melaksanakan program BOS ini pertama kali sekolah harus membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana program BOS tersebut. Dari informasi yang didapatkan dari pihak sekolah mengenai Tim Manajemen BOS Sekolah, SMP Ihsaniyah memiliki tim manajemen BOS sekolah yang kurang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam buku juknis BOS. Tim Manajemen BOS sekolah adalah kepala sekolah, bendahara, sekretaris, ketua komite, dan satu orang perwakilan dari orangtua siswa.

**Tabel 4.4 Susunan Tim Manajemen BOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Jumlah** |
| 1 | Ketua : Kepala Sekolah | 1 Orang |
| 2 | Sekretaris : Guru | 1 Orang |
| 3 | Bendahara : Guru | 1 Orang |
| 4 | Anggota : Komite Sekolah | 1 Orang |
| 5 | Anggota : Orang Tua Siswa | 1 Orang |
| JUMLAH | 5 Orang |

Sumber : SK Kepala Sekolah tentang Tim Manajemen BOS Tahun Ajaran 2017/2018

Sedangkan Menurut Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yang termasuk ke dalam tim manajemen BOS sekolah adalah kepala sekolah sebagai penanggungjawab, yang beranggotakan bendahara, satu orang unsur orang tua siswa diluar komite sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan komie sekolah, dan penanggungjawab pendataan, mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Tim Manajemen BOS sekolah sudah tertera di dalam Juknis BOS.[[134]](#footnote-134)

Sekolah menyusun RKAS yang di dalamnya mencakup rencana pembiayaan pendidikan yang ada di SMP Ihsaniyah. Pembiayaan pendidikan tersebut mencakup sumber dana yang diperoleh sekolah serta rincian-rincian penggunaan dana tersebut. Dana BOS merupakan sumber dana utama di SMP Ihsaniyah, karena semua kegiatan dibiayai oleh dana BOS termasuk semua honor guru yang ada disana. Walaupun di SMP Ihsaniyah ini masih mengadakan pungutan SPP sebesar RP.25.000/siswa/ bulannya, iuran itu berdasarkan kesepakatan bersama dengan wali murid tapi jumlah itu tidak seberapa besarnya, hanya untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada.

RKAS itu sendiri disusun oleh Tim manajemen BOS sekolah seperti bendahara dan kepala sekolah dan disepakati di dalam rapat oleh dewan guru, komite sekolah dan kepala sekolah. Setelah RKAS itu disetujui, maka ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan komie sekolah, kemudian disahkan oleh dinas. RKAS tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan program BOS ketika dana BOS sudah turun. Dana BOS digunakan untuk memenuhi biaya operasional sekolah.

 RKAS tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan program BOS ketika dana BOS sudah turun. Dana BOS digunakan untuk memenuhi biaya operasional sekolah. Dalam RKAS tahun ajaran 2017/2018 dipaparkan bahwa dana BOS yang diterima SMP Ihsaniyah digunaka untuk program kegiatan sekolah.

 Program-program kegiatan sekolah berusaha mengembangkan delapan standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan standar minimal tentang system pendidikan diseluruh wilayah Indonesia dan dijadikan tolak ukur pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Ada delapan standar nasional pendidikan, yang mendapat alokasi dana BOS, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan, standar pendidik dan kependidikan, standar pengelolaan, standar penilaian, standar proses, dan standar sarana dan prasarana. Jika sekolah dapat memenuhi seluruh delapan Standar Nasional Pendidikan, maka mutu pendidikan di Indonesia terjamin. Dapat dikatakan dana BOS membantu menjamin mutu pendidikan yang ada.

 Besar dana yang diterima sekolah tergantung dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Sebelumnya sekolah mengajukan laporan yang berisi data jumlah siswa baru mendapatkan dana BOS. Laporan data jumlah siswa selalu diperbaharui setiap enam bulan sekali atau setiap semester. Menurut buku petunjuk teknis penggunaan BOS, besar dana yang diterima oleh setiap siswa untuk tingkat SMP adalah Rp.1000.000,00/tahun (satu juta rupiah).

 Berdasarkan hasil penelitian, kelapa sekolah dan guru-guru SMP Ihsaniyah tidak mengetahui secara persis bagaimana penetapan alokasi dana BOS. Mereka hanya tahu kalau dana BOS disalurkan langsung dari pemerintahan pusat ke rekening sekolah. Menurut Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah itu ada dua tahap. Yang pertama adalah penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Yang kedua, penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening sekola. Dana BOS disalurkan setiap triwulan (tiga bulanan), tetapu untuk daerah terpencil, dana disalurkan setiap semester (enam bulan sekali).[[135]](#footnote-135)

 Pengambilan dan BOS dilakukan oleh kepala sekolah atas persetujuan kepala sekolah. Terkait hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mengambil dana BOS biasanya bendahara BOS dan kepala sekolah. Ketika pengambilan dana, form pengambilan tersebut juga ditandatangani oleh komite sekolah dan kepala sekolah yang disertai dengan cap sekolah. Tidak ada aturan tentang besar dana yang harus diambil. Pengambilan dana disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dana BOS yang tersimpan di rekening itu tidak mendapatkan potongan sama sekali oleh siapapun dan dengan alasan apapun.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana BOS di SMP Ihsaniyah masih belum bisa memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan, karena alokasi dana terbesar adalah untuk membayar honor guru sebesar 80% dari dana BOS yang diterima, honor guru merupakan biaya operasi yang termasuk ke dalam standar pembiayaan. Sehingga, untuk menutupi anggaran kegiatan lain pihak sekolah mengadakan pungutan biaya kepada wali murid sebesar RP. 25.000/siswa/bulan.

Menurut Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ada beberapa ketentuan umum dalam penggunaan dana BOS, serta komponen apa saja yang dapat dibiayai oleh dana BOS. Untuk pembayaran honor guru bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan dana BOS paling banyak 50% (Lima Puluh Persen) dari total BOS yang diterima. Dan ada 11 komponen pembiayaan yang tercantum dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS, Komponen-komponen tersebut diantaraya:

1. pengembangan perpustakaan
2. penyelenggaraan kurikulum 2006
3. penerimaan peserta didik baru
4. kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler
5. kegiatan evaluasi pembelajaran
6. pengelolaan sekolah.
7. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
8. langganan daya dan jasa.
9. pemeliharaan sarpras.
10. pembayaran honor.
11. pembelian atau perawatan alat multi media pemebelajaran.
12. dan biaya lainnya.[[136]](#footnote-136)

Penggunaan dana BOS sendiri harus jelas dan transparan. Untuk itu perlu adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Menurut Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program tiap tingkat (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak terkait. Hal-hal yang harus dilaporkan oleh pihak sekolah sudah tercantum ke dalam format resmi yang dibuat oleh pemerintah. Diantaranya Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah, Buku Kas Umum, Buku pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Berita Acara Pemerikasaan Kas dan bukti pengeluaran.

 Seluruh komponen pembiayaan yang dapat dibiayai oleh dana BOS itu tentunya sudah masuk dalam RKAS. RKAS yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Secara garis besar, pemanfaatan dana BOS disesuaikan dengan RKAS. Namun terkadang ada program kegiatan tidak jadi dilaksanakan. Hal ini dapat dikarenakan adanya kekurangan anggaran yang membuat sekolah harus mengurangi dana dari kegiatan lainnya. Sehingga realisasi penggunaan dan BOS berbeda dari rencana penggunaannya.

Untuk pembuatan laporan dan pertanggungjawaban, SMP Ihsaniyah sudah mengikuti petunjuk teknis yang berlaku seperti halnya, membuat laporan keungan dalam bentuk LPJ yang dikirimkan langsung oleh bendahara kepada pihak Dinas Kota serta menyertakan bukti fisik pembelian barang atau pengeluaran sesuai dengan format yang telah dibuat oleh pemerintah. Sealin itu pula, membuat laporan secara online yang dilakukan oleh pihak sekolah yang dikirim melalui aplikasi Dapodik untuk mengetahui jumlah siswa yang aktif disekolah itu.

Sekolah juga menginginkan pengalokasian dana BOS untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, karena program BOS sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dimana dengan adanya dana BOS, pemerintah mencoba menyamaratakan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Sehingga mutu pendidikan di setiap sekolah dapat terjamin.

Pengembangan sarana dan prasarana sekolah termasuk dengan pengadaan fasilitas dan alat-alat pembelajaran akan sangat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan disuatu sekolah. Ketika sarana dan prasarana lengkap tetapi tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik, maka penyelenggaraan pendidikan pun menjadi kurang baik. Untuk itu dana BOS dialokasikan baik untuk pengadaan barang ataupun kegiatan yang meningkatkan keterampilan guru dan siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, SMP Ihsaniyah ini memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti halnya ruang kelasyang tidak cukup sehingga musholah yang ada dialih fungsikan menjadi ruang kelas, ruang laboratorium yang seharusnya dugunakan untuk membantu proses pembelajaran pun tidak layak untuk difungsikan, serta tidak adanya ruang tata usaha yang khusus di sekolah ini. Dalam proses pembelajaran dikelas guru sudah menggunakan alat peraga yang ada, akan tetapi alat peraga untuk membantu proses pembelajaran di sekolah masih belum memenuhi kebutuhan guru. Guru pun melakukan pembelajaraan hanya dibantu oleh buku paket yang disediakan oleh pihak sekolah yang menjadi pedoman kurikulum. Seorang guru itu sendiri memiliki tanggung jawab untuk mengajar. Untuk mendukung dan menambah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, guru mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan mengajar, seminar dan lainnya.

 Dengan dibiayai dana BOS, sekolah sudah berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana dan fasilitas yang memadai. Dan juga berusaha meningkatkan keterampilan yang dimiliki tenaga pendidik dengan mengikut sertakan guru dalam kegiatan pelatihan dan seminar, akan tetapi dana BOS yang diterima sekolah ini belum cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. yang berakibatkan penyelenggaraan yang dilaksanakan pun belum maksimal.

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Pengawas bertanggung jawab tentang kefektifan program itu. Oleh karena itu, supervisi haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.[[137]](#footnote-137) Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi dalam program BOS merupakan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Kegiatan monitoring dan supervise dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Kegiatan monitoring dan supervisi ini dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

 Monitoring dan Supervisi dari luar yaitu dilaksanakan oleh pihak Dinas Kota yang berkunjung ke SMP Ihsaniyah setiap 1-2 bulan sekali untuk melaksanakan pengawasan adapun hal-hal yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Kota antara lain mengenai pelaporan keuangan penggunaan dana BOS dan bukti fisik yang ada. Selalin pengawasan dari luar pengawasan dari dalam pun dilaksanakan di SMP Ihsaniyah oleh pihak komite sekolah yang mengawasi ketika turunnya dana BOS ke sekolah, hal-hal yang biasa diawasi oleh pihak komite sekolah yaitu mengenai pengalokasian penggunaan dana BOS.

Adanya aturan-aturan dalam penggunaan BOS, tidak membuat sekolah kesulitan untuk melaksanakan program pemerintah ini. akan tetapi hambatan yang sering dirasakan oleh sekolah ini selama mengelola dana BOS yaitu sering terjadi keterlambatan pencairan dari pusat sehingga kegiatan pun terganggu karena tidak ada dana. Hambatan yang lainnya ialah terkendala dalam mebuat laporan pertanggungjawaban yang harus menyertakan bukti fisik pengeluran atau pembelian barang karena di sekolah ini masih belum bisa tertata dengan rapi untuk nota-nota pembelian barang

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh, deskripsi implementasi program BOS di SMP Ihsaniyah tersebut telah disajikan dan dibahas pada bab IV. Berikut dipaparkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

1. Secara umum implementasi program BOS yang ada di SMP Ihsaniyah telah dilaksankan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang tertuang di dalam Juknis. Mulai dari penyusunan tim manajemen BOS, menyusun RKAS, sampai membuat laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya sekolah pun memilih Tim manajemen BOS sekolah untuk mengurus segala hal yang yang berkaitan dengan pelaksanaan BOS di SMP Ihsaniyah. Tim BOS terdiri dari penanggung jawab yaitu kepala sekolah, bendahara dan sekretaris dipilih oleh kepala sekolah yang mendapat persetujuan dari seluruh pihak, komite sekolah dan wali murid. Hanya saja di SMP Ihsaniyah ini untuk penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan aturan yang ada di Juknis yang seharusnya honor guru diberikan 50% dari total dana yang diterima oleh sekolah bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Akan tetapi, di sekolah ini gaji guru yang diberikan mencapai 80% dari jumlah keseluruhan dana BOS yang diterima oleh sekolah. Sekolah menyusun laporan pertanggung jawaban yang berisi tentang rekapitulasi penggunaan dana BOS pada setiap komponen. Kemudian menyertakan buku kas umum, kas bank, buku pajak yang disertai dengan bukti fisik pembayaran berupa kwitansi dan nota, laporan tersebut dikumpulkan setiap triwulan. Hambatan yang dirasakan SMP Ihsaniyah ini, ketika pencairan dana BOS dari pusat yang seharusnya turun setiap triwulan mengalami keterlambatan, maka sekolah tidak akan bisa menjalankan program-program yang ada dikarenakan dana anggaran milik sekolah sangat minim sekali. Selain itu juga pengelolaan administrasi yang masih kurang tetata dengan baik berakibatkan keterlambatanya pembuatan Laporan pertanggungjawaban dana BOS
2. Monitoring dan supervisi program BOS dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kota setiap 3 bulan sekali. Bentuk pengawasan yang dilakukan ialah dengan melihat laporan penggunaan dana, dan bukti-bukti fisiknya. Sedangkan, untuk monitoring dan supervise dari dalam yang dilakukan oleh komite sekolah belum berjalan sebagai semestinya tidak ada pengawasan secara maksimal oleh komite sekolah bahkan komite sekolah tidak tahu secara keseluruhan mengenai pengelolaan dana BOS hanya sebatas mengetahui bahwa disekolahan ini mendapatkan penyaluran dana BOS dan komite sekolah terlibat di dalamnya.
3. Program BOS membantu sekolah menyelenggarakan pendidikan, mulai dari perawatan gedung sekolah, pengadaan alat peraga, dan sarana prasarana lainnya yang mendukung proses pembelajaran, serta kegiatan-kegiatan yang membantu meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan juga siswa. Akan tetapi di sekolah ini, masih banyak penyelenggaraan pendidikan yang belum maksimal seperti halnya kurangnya sarana prasarana yang memadai, pengadaan alat peraga yang masih belum maksimal untuk membantu proses pembelajaran, dan tenaga pendidik yang masih kekurangan.
4. **Saran**

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah antara lain:

1. Diharapkan kepada Tim Manajemen BOS SMP Ihsaniyah untuk lebih maksimal dalam mengelola anggaran dana agar dapat mengikuti aturan yang sudah terrtulis di dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS.
2. SMP Ihsaniyah harus lebih meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan terutama di dalam komponen sarana prasarana untuk menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar yang ada, menyediakan alat peraga yang dibutuhkan oleh tenga pendidik untuk membantu proses pembelajaran, dan menambah tenaga pendidik baru yang kompeten dalam bidang nya.
3. Komite Sekolah di SMP Ihsaniyah harus lebih berpartisipasi dalam pengelolaan penggunaan dana BOS agar pelaksanaan program BOS dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
1. E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Daryanto, Mohammad Farid, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Di Sekolah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), 129 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatakan Mutu Sekolah Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 13 [↑](#footnote-ref-3)
4. Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 265 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Ar-Ruzz Media, 2010), 167 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Rosdakarya, 2009), 47 [↑](#footnote-ref-7)
8. Eneng Muslihah, *Kinerja Kepala Sekolah* ( Jakarta: Haja Mandiri, 2013), 29 [↑](#footnote-ref-8)
9. Fitri Apriliana, *Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Kota Selayan* Kota Bukit Tinggi, bahana manajemen pendidikan ,2014, 2, 33-831 [↑](#footnote-ref-9)
10. Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 163 [↑](#footnote-ref-10)
11. Daryanto, Mohammad Farid, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Di Sekolah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), 129 [↑](#footnote-ref-11)
12. Jamadi, “Program bantuan Operasional Sekolah”, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, Januari 12, 2019. [↑](#footnote-ref-12)
13. Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik ( Edisi revisi)*  (Bandung: Alfabeta, 2017), 128 [↑](#footnote-ref-13)
14. Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik,* 133-136 [↑](#footnote-ref-14)
15. Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik,* 136 [↑](#footnote-ref-15)
16. Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi),* 137 [↑](#footnote-ref-16)
17. Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 7 [↑](#footnote-ref-17)
18. Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran, 8* [↑](#footnote-ref-18)
19. Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* ( Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 101-102 [↑](#footnote-ref-19)
20. Siti Erna Latifi, Suryana, “Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang”, (Tesis Magister, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009),p.28 [↑](#footnote-ref-20)
21. Haedar Akib, Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif,Model, dan Kriteria Pengukurannya,* 2002, 12 [↑](#footnote-ref-21)
22. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media Group, 2010), 71 [↑](#footnote-ref-22)
23. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 112 [↑](#footnote-ref-23)
24. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), 47 [↑](#footnote-ref-24)
25. Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU* (Jakarta: Depdiknas, 2001), 3 [↑](#footnote-ref-25)
26. Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 122. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 76 [↑](#footnote-ref-27)
28. Yahya, *Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Suatu Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera barat* (Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), p.39 [↑](#footnote-ref-28)
29. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan,* 112 [↑](#footnote-ref-29)
30. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 77 [↑](#footnote-ref-30)
31. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 77 [↑](#footnote-ref-31)
32. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 78 [↑](#footnote-ref-32)
33. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 79 [↑](#footnote-ref-33)
34. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 81 [↑](#footnote-ref-34)
35. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan,* 47 [↑](#footnote-ref-35)
36. Yahya, *Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Suatu Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera barat* (Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), p.39 [↑](#footnote-ref-36)
37. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan,* 81-90 [↑](#footnote-ref-37)
38. Mulyono, *konsep pembiayaan pendidikan* (Bandung: Ar-ruZ Media, 2010), 89. [↑](#footnote-ref-38)
39. F.C. Lunenburg and A. Ornstein, *Education Administration (Concept and Practices),*(London: Thomson learning Berkshire house, 2000),359 [↑](#footnote-ref-39)
40. Mulyono, *konsep pembiayaan pendidikan*, 92 [↑](#footnote-ref-40)
41. F.C. Lunenburg and A. Ornstein, *Education Administration (Concept and Practices),359* [↑](#footnote-ref-41)
42. Mulyono, *konsep pembiayaan pendidikan*, 93 [↑](#footnote-ref-42)
43. Mulyono, *konsep pembiayaan pendidikan*, 103 [↑](#footnote-ref-43)
44. Mulyono, *konsep pembiayaan pendidikan*, 111-115 [↑](#footnote-ref-44)
45. Suharsimi Arikunto, Lia yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta:Aditya Media,2008), 9-14 [↑](#footnote-ref-45)
46. Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan* *Komprehensif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 46. [↑](#footnote-ref-46)
47. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan,* 47 [↑](#footnote-ref-47)
48. Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70 [↑](#footnote-ref-48)
49. Suharsini, Lia, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 318 [↑](#footnote-ref-49)
50. Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Rosda 2010), cet. 2, 5-6 [↑](#footnote-ref-50)
51. Ashar Arsyad,  *Pokok Manajemen* (Yogyakarta: Pustaka Pelaajar, 2002), 20 [↑](#footnote-ref-51)
52. Asmendri, Pengantar Studi Manajemen Pendidikan (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2008), 18 [↑](#footnote-ref-52)
53. Fauzan, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Modernisasi Vol. 10 No.3, Oktober, 2014), 166* [↑](#footnote-ref-53)
54. Buku Panduan, *Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Belajar 9 Tahun Yang Bermutu ( Jakarta:* Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 8 [↑](#footnote-ref-54)
55. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 171 [↑](#footnote-ref-55)
56. “ Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.Dalam acp.ahkn@2008, diakses pada sabtu 30 Januari 2010, 2-4 [↑](#footnote-ref-56)
57. Buku Panduan, *Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Belajar 9 Tahun Yang Bermutu,* 10 [↑](#footnote-ref-57)
58. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah* (Serang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2018), 10 [↑](#footnote-ref-58)
59. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah*, 11 [↑](#footnote-ref-59)
60. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah*, 11 [↑](#footnote-ref-60)
61. Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan (Malang: Ar-Ruzz Media, 2008), 27 [↑](#footnote-ref-61)
62. Asmendri, Pengantar Studi Manajemen Pendidikan (Batusangkar: STAIN Batusangkar Pess), 11 [↑](#footnote-ref-62)
63. Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, 191-194 [↑](#footnote-ref-63)
64. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*, 22 [↑](#footnote-ref-64)
65. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah*, 13 [↑](#footnote-ref-65)
66. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah*, 42 [↑](#footnote-ref-66)
67. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah*, 57-69 [↑](#footnote-ref-67)
68. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah*, 43 [↑](#footnote-ref-68)
69. Asmendri, *Pengantar Studi Manajemen Pendidikan*, 17 [↑](#footnote-ref-69)
70. Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan, 56-57 [↑](#footnote-ref-70)
71. Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 179 [↑](#footnote-ref-71)
72. Abdul Kadir Karding*, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Di Kota Semarang,* (Tesis Magister, Program Pascasarjana, Universitas Diponogoro, Semarang, 2008), p. 136 [↑](#footnote-ref-72)
73. Fauzan, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Modernisasi Vol. 10 No.3, Oktober, 2014), 166* [↑](#footnote-ref-73)
74. Nurul Hariswati, *Analisa Akuntabilias dan Transparasi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program BOS* (Ekonomi-Bisnis Vol.6 No.1, Januari, 2015), 84 [↑](#footnote-ref-74)
75. Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 145. [↑](#footnote-ref-75)
76. Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68. [↑](#footnote-ref-76)
77. Darwyansyah, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* (Jakarta: Haja Mandiri, 2017), 31. [↑](#footnote-ref-77)
78. Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 9. [↑](#footnote-ref-78)
79. Darwyansyah, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* 49 [↑](#footnote-ref-79)
80. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatf, Kualitatif, dan R&D,* 14 [↑](#footnote-ref-80)
81. Darwyansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ( Jakarta: Haja Mandiri, 2017), 47 [↑](#footnote-ref-81)
82. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif , Kualitatif, dan R&D,* 31. [↑](#footnote-ref-82)
83. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* 246 [↑](#footnote-ref-83)
84. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D,* 247 [↑](#footnote-ref-84)
85. Darwyansyah, *Metode penelitian kualtitatif dan kuantitatif*, 54. [↑](#footnote-ref-85)
86. Darwyansyah, *Metode penelitian kualtitatif dan kuantitatif*, 54. [↑](#footnote-ref-86)
87. Darwyansyah, *Metode penelitian kualtitatif dan kuantitatif*, 55-56. [↑](#footnote-ref-87)
88. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* 189. [↑](#footnote-ref-88)
89. Jamadi, *“Profil Sekolah“*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-89)
90. Ayu Lestari, *“Data Komponen-komponen sekolah”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-90)
91. Jamadi, *“Organisasi Pelaksanaan Program “*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-91)
92. Lilis Lestari, *“Organisasi Pelaksanaan Program”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-92)
93. Ayu Lestari, *“Organisasi Pelaksanaan Program”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-93)
94. Bahrullu’lu, *“Organisasi Pelaksanaan Program”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-94)
95. Jamadi, *“Organisasi Pelaksanaan Program “*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-95)
96. Lilis Lestari, *“Organisasi Pelaksanaan Program”,* interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-96)
97. Jamadi*, “Prosedur Pelaksanaan BOS“* , interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-97)
98. Lilis Lestari, *“Prosedur Pelaksanaan BOS ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-98)
99. Ayu Lestari*, “Prosedur Pelaksanaan BOS ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-99)
100. Bahrullu’lu, *“Prosedur Pelaksanaan BOS ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-100)
101. Jamadi, *“Prosedur Pelaksanaan BOS“*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-101)
102. Lilis Lestari, *“Prosedur Pelaksanaan BOS ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-102)
103. Jamadi, *“Penggunaan Dana BOS“* , interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-103)
104. Lilis Lestari, *“Penggunaan Dana BOS ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-104)
105. Bahrullu’lu, *“Penggunaan Dana BOS ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-105)
106. Ayu Lestari, *“Penggunaan Dana BOS“* , interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-106)
107. Jamadi, *“Penggunaan Dana BOS“*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-107)
108. Lilis Lestari, *“Penggunaan Dana BOS ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-108)
109. Jamadi, *“Monitoring dan Supervisi “*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-109)
110. Lilis Lestari, *“Monitoring dan Supervisi”,* interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-110)
111. Bahrullu’lu, *“Monitoring dan Supervisi”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-111)
112. Ayu Lestari*, “Monitoring dan Supervisi”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-112)
113. Jamadi, *“Monitoring dan Supervisi “* , interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-113)
114. Lilis Lestari, *“Monitoring dan Supervisi”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-114)
115. Saefullah, *“Monitoring dan Supervisi”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-115)
116. Jamadi, *“Laporan dan Pertanggungjawaban “* , interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-116)
117. Lilis Lestari, *“Laporan dan Pertanggungjawaban* ”, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-117)
118. Bahrullu’lu, *“Laporan dan Pertanggungjawaban* ”, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-118)
119. Ayu Lestari, *“Laporan dan Pertanggungjawaban ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-119)
120. Lilis Lestari, *“Sarana dan Prasarana”,* interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-120)
121. Jamadi, *“Sarana dan Prasarana”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-121)
122. Lilis Lestari, *“Kemampuan dan Layanan Siswa”,* interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-122)
123. Jamadi, *“Kemampuan dan Layanan Siswa”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-123)
124. Mia, *“Kemampuan dan Layanan Siswa”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-124)
125. Sri Widiya, *“Kemampuan dan Layanan Siswa”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-125)
126. Jamadi, *“Latar Belakang Siswa”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-126)
127. Lilis Lestari, *“Latar Belakang Siswa”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (21 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-127)
128. Sri Widiya, *“Latar Belakang Siswa”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019). [↑](#footnote-ref-128)
129. Sri Widiya, *“Layanan dan Kemampuan Belajar ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-129)
130. Saliman, *“Layanan dan Kemampuan Belajar ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-130)
131. Mia, *“Layanan dan Kemampuan Belajar ”*, interview by Alfi Permata Insani, Serang, SMP Ihsaniyah, (22 Januari 2019) [↑](#footnote-ref-131)
132. Fauzan, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Modernisasi Vol. 10 No.3, Oktober, 2014), 166* [↑](#footnote-ref-132)
133. Asmendri, Pengantar Studi Manajemen Pendidikan, 11 [↑](#footnote-ref-133)
134. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah* (Serang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2018), 21 [↑](#footnote-ref-134)
135. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah* (Serang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2018), 36 [↑](#footnote-ref-135)
136. Buku Panduan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah* (Serang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2018), 67 [↑](#footnote-ref-136)
137. Asmendri, *Pengantar Studi Manajemen Pendidikan* (Batusangkar:STAIN Batusangkar Press,2008), 17 [↑](#footnote-ref-137)